

**LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2009**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



BUPATI BANGKALAN

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, dengan ini disampaikan laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Tahun 2009. Hal ini merupakan informasi lanjutan mengenai kondisi perubahan lingkungan di Kabupaten Bangkalan yang secara rutin setiap tahun di publikasikan. Laporan ini disampaikan untuk memberikan informasi kepada semua pihak mengenai potensi sumber daya alam, perubahan lingkungan dan pengendalian lingkungan di Kabupaten Bangkalan.

Isu lingkungan hidup utama Kabupaten Bangkalan tahun 2009 adalah : perubahan tata guna lahan/konversi hutan dan lahan sebagai dampak dari pengembangan wilayah industri Jawa Timur yang akan di tempatkan di Kabupaten Bangkalan, dengan diawali pembangunan jembatan Suramadu dan jalan akses di sisi Madura. Di samping isu lingkungan utama terdapat isu lingkungan lainnya seperti halnya : meningkatnya timbulan sampah, menurunnya debit air di beberapa sumber mata air, pencemaran air, limbah domestik, sumberdaya pesisir laut, kondisi lingkungan pemukiman.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam upaya melestarikan lingkungan dilakukan melalui program terpadu lintas sektoral dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat yang pada saat ini Kabupaten Bangkalan sedang melakukan penambahan luasan ruang terbuka hijau. Lingkungan Hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Esa kepada Rakyat dan Bangsa Indonesia pada umumnya serta masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya, merupakan karunia dan rahmat yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

Semoga informasi potensi lingkungan Kabupaten Bangkalan yang disusun dalam Status Lingkungan Hidup (SLHD) bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat pada masa yang akan datang.

Bangkalan, Nopember 2009

BUPATI BANGKALAN

RKH. FUAD AMIN, SPd.

ABSTRAK

Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan merupakan aktifitas memanfaatkan seluruh sumber daya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya memelihara keseimbangan lingkungan alami (sumber daya alam, hayati, non-hayati) dan lingkungan binaan (sumber daya manusia dan buatan).

Perkembangan Kabupaten Bangkalan yang sangat pesat tidak terlepas dari potensi dan dukungan yang dimiliki, sector pertanian, peternakan, pertanian, pertambangan migas, galian golongan C, kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa, berkembang sangat cepat di beberapa wilayah di Kabupaten Bangkalan terutama dipusat kota, sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bangkalan pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi di pihak lain akan memberikan tekanan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga daya dukung lingkungan akan melampaui batas akibat penggunaan sumber daya alam dan lingkungan berlebihan. Hal ini akan berdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Luas wilayah Kabupaten Bangkalan ± 1260,14 km² terdiri dari 18 kecamatan, 10 kecamatan yang berpantai. Kondisi Kabupaten Bangkalan pada saat ini belum banyak industri, yang ada hanya home industri, bengkel, usaha jasa, relayan yang belum memberikan kontribusi terhadap perubahan lingkungan hidup.

Isu lingkungan hidup utama yang berkembang dan berkecenderungan meningkat di Kabupaten Bangkalan pasca Pembangunan Jembatan Suramadu adalah konversi hutan dan lahan/peubahan tata guna lahan. Hal ini disebabkan karena pada 3 kecamatan antara lain kecamatan Labang, Tragah, burneh terjadi alih fungsi lahan dari sawah berubah menjadi jalan akses Suramadu seluas 66 Ha dan berkecenderungan meningkat pada saat BPWS mulai mengembangkan fungsi lahan tersebut ke pengembangan industri dan sarana pendukung lainnya yang menurut tata ruang akan ada alih fungsi lahan seluas 600 Ha.

Isu lingkungan hidup lainnya adalah meningkatnya timbulan sampah, menurunnya debit air di beberapa sumber mata air, pencemaran air, sumber daya pesisir, kondisi lingkungan pemukiman, iklim, bencana alam dan pencemaran udara.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan lingkungan dan berupaya untuk pemutakhiran data perubahan lingkungan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih luas pasca pembangunan jembatan suramadu sehingga fungsi ekosistem di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan sebagaimana fungsi ekologis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BUPATI BANGKALAN	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Isu-Isu Lingkungan Hidup.....	4
1.5 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan	12
BAB 2 GAMBARAN UMUM.....	16
2.1 Visi Pembangunan Kabupaten Bangkalan.....	16
2.2 Misi Pembangunan Kabupaten Bangkalan	16
2.3 Kondisi Geografis, Demografis, Geologi, Tata Ruang, Kependudukan Dan Kesehatan Masyarakat	16
BAB 3 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA	21
A. Lahan dan Hutan.....	21
B. Keanekaragaman Hayati.....	24
C. Air.....	26
D. Udara.....	28
E. Laut, Pesisir dan Pantai	30
F. Iklim.....	34
G. Bencana Alam	35
BAB 4 TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN	38
A. Kependudukan	38
B. Permukiman.....	40
C. Kesehatan.....	42
D. Pertanian	43
E. Industri.....	45
F. Pertambangan.....	47
G. Energi	49
H. Transportasi.....	50
I. Pariwisata	51
J. Limbah B3.....	53

BAB 5	RENCANA DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	55
5.1	Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan	55
5.1.1	Penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau.....	55
5.1.2	Pengelolaan Sampah.....	55
5.1.3	Sumber Mata Air.....	56
5.1.4	Pencemaran Udara.....	56
5.1.5	Luasan Lahan dan Hut an	57
	A. Rehabilitasi Lingkungan	57
	B. Amdal	61
	C. Penegakan Hukum	61
	D. Peran Serta Masyarakat	62
	E. Kelembagaan	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan (United Nations Convergence on Environment and Development UNCED) di Rio De Jeniero, Tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan kedalam agenda 21.

Dalam agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Pembangunan di Indonesia masih bergantung pada sumber daya alam (SDA), akan tetapi pembangunan berkelanjutan mengacu pada persetujuan atau agreement agenda 21 yang meliputi pengelolaan limbah, pelayanan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lahan serta prinsip –prinsip kehutan melalui konversi deodevercity.

Peningkatan laju pembangunan berbanding terbalik dengan dampak lingkungan sebagai sebab akibat dari proses kegiatan pembangunan. Permasalahan lingkungan yang timbul adalah menurunnya kualitas fungsi lingkungan yang disebabkan adanya pencemaran udara/air, kerusakan lingkungan, bencana alam, gangguan kesehatan, dan perubahan tatanan ekosistem.

Dalam pengembangan kawasan industri Jawa Timur madura khususnya Kabupaten Bangkalan telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan industri Jawa Timur wilayah utara, dengan diawali pembangunan sarana utama berupa jembatan suramadu dan jalan akses kedua sisi Surabaya dan Madura.

Perubahan tata ruang Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bangkalan telah menetapkan kebutuhan untuk pengembangan industri di wilayah Kabupaten Bangkalan salah satunya adalah sumber daya alam berupa lahan dan air serta kebutuhan lainnya. Berdasarkan penetapan tata ruang Kabupaten Bangkalan, akan terjadi konversi lahan dan hutan secara besar-besaran yang apabila tidak diatur berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Nomor 23 Tahun 1997 akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu mengantisipasi kemungkinan dampak lingkungan yang akan timbul dibutuhkan rencana pengelolaan lingkungan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan kebutuhan informasi oleh masyarakat, pihak ketiga yang berkepentingan maka diperlukan database lingkungan serta perubahan lingkungan yang tersusun sebagaimana ketentuan berupa Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kabupaten Bangkalan sebagai pijakan Pimpinan Daerah dalam mengambil keputusan dan merencanakan pembangunan yang lebih komprehensif yang berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

1.2 DASAR PENYUSUNAN

Dasar Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan adalah:

- UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 10 huruf h : *"Pemerintahan berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat"*
- Agenda 21 Chapter 40 : *"Pentingnya ketersediaan informasi di segala aspek lingkungan dan pembangunan untuk mengambil keputusan menuju pembangunan berkelanjutan"*
- Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan internasional dan amanat UU di atas sejak tahun 2002 diwajibkan menerbitkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Propinsi Kabupaten setiap tahun.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan adalah :

- 1) Menyediakan dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kefahaman akan kecenderungan dan kondisi lingkungan.
- 3) Memfasilitasi pengukuran kemajuan menuju keberlanjutan.
- 4) Menyediakan informasi secara rutin tentang kondisi lingkungan kini dan prospeknya dimasa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, orgnisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan.
- 5) Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan himpunan indikator dan index lingkungan yang disepakati pada tingkat nasional.
- 6) Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanya evaluasi akan rencana mendatang.
- 7) Laporkan keefektifan kebijakan dan proram yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan, termasuk kemajuan dalam mencapai standart dan target lingkungan.
- 8) Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjamin keberlanjutan ekologis.
- 9) Merancang mikanisme integrasi informasi lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa.

1.4 ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP

ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN



Perubahan tata guna lahan



Pembangunan Jembatan Suramadu

Konversi lahan dan hutan / perubahan tata guna lahan untuk pem bangunan jembatan suramadu jalan akses dan kawasan industri.

MATRIKS PRESSURE STATE RESPON

Pressure	State	Respon
<p>1. Kepres No.55 tahun 1990 tentang adanya koordinat dalam pembangunan jembatan suramadu dan menjadi satu paket dengan pembangunan industri di Kab. Bangkalan.</p> <p>2. Kepres No.79 tahun 2003 perubahan dari Kepres sebelumnya memperjelas pengembangan ekonomi pulau madura di mulai dari pembangunan jembatan suramadu sebagai sarana transportasi utama dalam pengembangan kawasan industri dan kepentingan lainnya.</p> <p>3. Perbub No. 28 tahun 2009, Pengendalian Pengembangan kawasan Suramadu di Kabupaten Bangkalan</p>	<p>Dampak dari pembangunan jembatan suramadu terhadap kondisi lingkungan di kawasan tersebut terjadi perubahan tata guna lahan yang sangat luas (konf ersi lahan dan hutan). Salah satunya adalah lahan yang di butuhkan jalan akses suramadu telah mempergunakan 66 Ha lahan sawah dan tegalan dengan rincian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di Kecamatan labang seluas 42 Ha merupakan lahan pertanian. 2. Di Kecamatan Trageh 11,1 Ha merupakan lahan pertanian. 3. Di Kecamatan Burneh 9,9 Ha merupakan lahan pertanian tehnis . 4. Rencana kawasan industri telah terjadi perubahan peruntukan seluas 600 Ha. 5. Untuk frontage roat akan dipergukan lahan seluas 55 Ha total perubahan tata guna lahan 721 Ha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah di upayakan untuk mengembalikan fungsi kualitas lingkungan syang di sebabkan oleh perubahan tata guna lahan/konversi hutan dan lahan melalui pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan da pengelolaan lingkungan. 2. Melaksanakan UU No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang, prihal kewajiban 30% dari luas wilayah. 3. Bupati Bangkalan mengirim kan surat dengan Nomor : 660/1778/433.303/2009 kepada Gubernur Jawa Timur prihal usulan penghijauan jalan akses suramadu sisi madura melalui bantuan dana APBD 1 T. A 2010 sebagai langkah kongkrit dalam menge, balikan kualitas fungsi lingkungan di kawasan tersebut. 4. partisipasi masyarakat penghijauan pantai.

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Timbulan Sampah Plastik



Sampah Campuran di TPA Buluh

MENINGKATNYA TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGKALAN (Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat) Sebagaimana Tercantum Pada UU No. 18 Tahun 2008.

Matriks State Pressure Respon Timbulan Sampah

Pressure	State	Respon
Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan yang mana timbulan sampah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2008 mencapai 1.853,168 m ³ /hari setara 518,887 ton/hari. Setiap hari ada kecenderungan meningkat dengan jumlah yang variatif. Sumber data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Timbulan sampah perkotaan (kota Bangkalan) 140,988 m ³ /hari setara dengan 39,48 ton/hari.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2008 1,02%. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan 956.966 jiwa. 2. Perubahan gaya hidup masyarakat Bangkalan ke arah gaya hidup modern. 3. Pertumbuhan ekonomi. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah. 5. Belum ada kebijakan yang mewajibkan masyarakat melakukan pemilahan sampah. 6. Masyarakat membuang sampah tidak disesuaikan dengan jadwal pengangkutan sampah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi Penyuluhan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 2. Peningkatan Pelaksanaan tugas dan wewenang, yang mencakup tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten/kota. 3. Peningkatan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. 4. Kemudahan pemberian izin usaha kepada setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah. 5. Menggugah partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum pengelolaan sampah. 6. Melakukan pemilahan sampah. 7. Melakukan pengelolaan sampah dengan mekanisme 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 8. Mengadakan kerjasama (bina mitra) melalui pelatihan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah. 9. Pemerintah daerah merencanakan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan sampah. 10. Pengawasan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. 11. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Sanksi administrasi yang dilanjutkan dengan ketentuan pidana.

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Air menyusut di Dam Bumeh



Menurunnya debit mata air

MENURUNNYA JUMLAH DEBIT AIR DI BEBERAPA SUMBER MATA AIR DI KABUPATEN BANGKALAN

MATRIKS STATE PRESSURE RESPON SUMBER MATA AIR

Pressure	State	Respon
<p>Potensi air tanah dalam bentuk sumber mata air di Kabupaten Bangkalan ada 119 sumber mata air dengan jumlah debit 8.846 liter/detik yang mana dari 119 sumber mata air hanya 9 sumber mata air yang memiliki debit di atas 100 – 500 liter/detik dan 1 sumber mata air yang debatnya 4250 liter/detik yaitu sumber mata air Pocong sedangkan sisanya berada di bawah 100 liter/detik bahkan ada yang debatnya 5 liter/detik. Yang setiap tahun debit air mengalami penurunan yang signifikan sebagaimana gambar di atas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya penebangan hutan. 2. Konversi hutan menjadi lahan permukiman, pertanian, pertambangan, pariwisata dan pembangunan lainnya. 3. Kondisi iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan curah hujan. 4. Meningkatnya lahan kritis. 5. Pembangunan jalan akses Suramadu. 6. Tidak optimalnya peran serta fungsi kelompok pelestari lingkungan. 7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan/hutan lindung. 8. Pencemaran air maupun industri yang mengabaikan kelestarian lingkungan. 9. Berubahnya fungsi daerah tangkapan air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggugah peran serta masyarakat bersama pemerintah memperbaiki penutupan lahan yang biayanya dari DAU/DAK 2. Mensinergikan program penghijauan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Balai Pengelola Das Brantas Wilayah Madura dan Perum Perhutani Jawa Timur. 3. Mendiversifikasi produk dan lahan antara tanaman jangka pendek dan jangka panjang (tanaman kehutanan). 4. Pengembangan luasan hutan rakyat. 5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan percortohan wanatani, usaha pelestarian sumber daya alam, model percortohan hutan rakyat. 6. Penegakan hukum lingkungan dan illegal logging.

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Sumber pencemaran udara



Emisi Gas Rumah Kaca dari Asap Kendaraan

PENCEMARAN UDARA DI KABUPATEN BANGKALAN

MATRIKS STATE PRESSURE RESPON PENCEMARAN UDARA

Pressure	State	Respon
<ol style="list-style-type: none"> Sumber potensial pencemaran udara di Kabupaten Bangkalan berasal dari kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil. Jumlah industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara sebanyak 10 industri pembakaran kapur, 3 industri tahu, 1 industri kecap dan pembuatan batik tulis. Pembakaran sampah. Sampah yang open dumping (tidak diolah) Secara kualitas dan kuantitas data pencemaran udara tersebut belum didapatkan data yang representatif. 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kendaraan roda 4 tahun 2008 sebanyak 4450 buah yang berbahan bakar bensin 2160 sedangkan yang berbahan bakar solar 2439 (kendaraan roda 2 sebanyak ±7000 buah) yang sangat signifikan mengingat Bangkalan sebagai pintu gerbang keluar masuknya kendaraan bermotor baik yang menuju Madura maupun yang keluar Madura. meningkatnya Jumlah alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan mega proyek. Meningkatnya emisi CO₂. Banyaknya gangguan pernapasan. Terlepasnya gas metana (CH₄) ke udara bebas karena sampah yang tidak diolah, sehingga terjadi dekomposisi anaerob. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran udara melalui pemantauan udara dengan pemasangan alat ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) dan mengaplikasikan alat pengendali pencemaran udara secara rutin. Melakukan pola pemanfaatan seperti sampah menjadi energi alternatif dengan teknologi insenerasi dan biodegestor anaerobik. Merubah perilaku masyarakat dengan 1 hari tanpa kendaraan bermotor. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keseimbangan udara. Pengendalian pencemaran udara dengan diversifikasi energi dengan bahan bakar bersih atau pemakaian filter pada pengeluaran asap kendaraan.

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Hutan MusawwiKec. Gegger



Tutupan Lahan Tera Serring

LUASAN LAHAN DAN HUTAN

MATRIKS STATE PRESSURE RESPON LUASAN LAHAN DAN HUTAN

Pressure	State	Respon
1. Luas Kab. Bangkalan 1.260,14 Km ² terbagi menjadi :	1. Konversi hutan menjadi lahan permukiman, pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, tempat wisata dan lain-lain.	1. Perluasan reboisasi yang harus dilakukan oleh pihak perhutani.
2. Hutan Rakyat 14962 Ha setara 11,87 %	2. Kondisi lahan hanya ditutupi hutan 4,77% seluas 8.289 Ha.	2. Ketepatan penghijauan yang dilakukan oleh DAS Brantas Wilayah Madura.
3. Kebun 8813 Ha. setara dengan 6,99 %	3. Kerusakan hutan (illegal logging).	3. Pemerintah menyediakan dana yang memadai dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk ikut memperbaiki penutupan lahan.
4. Lahan kritis 49709 Ha setara dengan 39,44 %	4. Pengambilan pasir di area hutan yang tidak terkendali.	4. Memerlukan tebang tanam dengan diversifikasi tanaman jangka panjang dan jangka pendek atau tanaman industri dan tanaman tegakan.
5. Sawah 29462 Ha setara dgn 23,38%,	5. Kurangnya pengetahuan kelompok masyarakat akan pelestarian dan perlindungan hutan.	5. Kewajiban pemerintah memberikan penghargaan terhadap kelompok masyarakat yang senantiasa mengelola tanaman tegakan hutan dan yang memberikan motivasi kepada masyarakat luas untuk melestarikan dan mengembangkan luasan hutan rakyat maupun perhutani.
6. Tegalan 63.276Ha setara dgn 10,77 %.	6. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum illegal logging.	6. Diupayakan adanya kebijakan untuk membuat pembibitan yang ditempatkan di lahan masyarakat pedesaan yang pengerjaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sampai ke tingkat pemeliharaannya (memberikan nilai ekonomis).
7. Hutan Negara 3186Ha atau setara dengan 0,03 %	7. Kebakaran hutan yang akan mengakibatkan lepasnya gas CO ₂ ke udara.	
8. Luas wilayah perkotaan Bangkalan 18,08 Km ² , terdiri dari 7 Kelurahan.	8. Berkurangnya debit sumber mata air.	
9. Luas Hutan Kota 9.888 m ² setara 0,988 Ha atau 0,06% dari luas wilayah perkotaan.	9. Meningkatnya lahan kritis.	
	10. Ketergantungan hidup masyarakat di sekitar terhadap tanaman tegakan hutan.	

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Keanekaragaman Hayati Fauna



Flora Fauna di Tambak Ujung Piring

KEANEKARAGAMAN HAYATI

MATRIKS STATE PRESSURE RESPON KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pressure	State	Respon
<p>1. Ada beberapa jenis tanaman lokal di Kabupaten Bangkalan yang lokasinya di pesisir ± 8 jenis yang kondisinya mengkhawatirkan dan terancam.</p> <p>2. Terdapat 35 tumbuhan darat dengan status hutan rakyat dan perhutani.</p> <p>3. Terdapat 15 jenis burung. Secara kuantitas berangsur-angsur mulai berkurang.</p>	<p>1. Perubahan konversi lahan berupa hutan, kawasan pesisir menjadi lahan permukiman, pertanian, industri, kawasan wisata, pertambangan.</p> <p>2. Kerusakan hutan baik karena bencana alam maupun ulah manusia mengakibatkan rusaknya habitat kehidupan hayati.</p> <p>3. Pencemaran air dan penebangan pohon akan berdampak kepada mutu kualitas air yang berpengaruh keberlangsungan hewan dan tumbuhan.</p> <p>4. Perburuan hewan/burung tanpa toleransi secara kuantitas.</p>	<p>1. Pemberian sanksi hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>2. Melakukan reboisasi / penghijauan secara terpadu.</p> <p>3. Menyiapkan program pengendalian lingkungan dan sanitasi berbasis masyarakat pada klaster wilayah miskin baik diperkotaan maupun di kawasan hutan dan pesisir.</p> <p>4. Pemberian sanksi hukum pada pemburu hewan-hewan/burung yang berlebihan.</p> <p>5. Mengupayakan dilakukan survey/studi terhadap perkembangan hayati dengan interval waktu minimal 2 tahun sekali.</p>

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Laut dan pantai Ds. Tengket Kec. Arosbaya



Mangrove Gladak Lanjeng Bangkalan

PESISIR DAN LAUT

MATRIKS STATE PRESSURE RESPON PESISIR DAN LAUT

Pressure	State	Respon
1. Dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan 10 Kecamatan yang mempunyai pantai, 8 Kecamatan yang ada tutupan tanaman mangrove dengan luas 792,5 Ha setara dengan 22,52 Km ² atau sama dengan 1,8% dari total luas wilayah Bangkalan. 2. 8 Kecamatan yang mempunyai tutupan dan kerapatan mangrove : Bangkalan, Arosbaya, Sepuluh, Socah, Kamal, Labang, Kwanyar, Modung. 3. Data terumbu karang tidak tersedia. 4. Panjang garis pantai kabupaten Bangkalan ±124,10 km	1. Perubahan konversi lahan berupa kawasan pesisir dan laut menjadi kawasan permukiman, tambak intensifikasi, industri. 2. Eksploitasi sumber daya hayati pesisir dan laut untuk kepentingan ekonomis dengan tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. 3. Penebangan liar tumbuhan di pantai/pesisir untuk kepentingan permukiman nelayan. 4. Akibat pencemaran air laut yang melewati ambang batas baku mutu. 5. Abrasi Pantai	1. Meningkatkan program rehabilitasi hutan mangrove. 2. Pelatihan masyarakat pesisir untuk pengendalian kerusakan ekosistem pesisir, demplot, model percontohan hutan bakau yang ideal. 3. Sosialisasi ke masyarakat luas khususnya ke masyarakat nelayan, pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove. 4. Pemberian sanksi hukum terhadap Pelanggaran Perda Tata Ruang. 5. Memberikan sanksi hukum terhadap penebangan hutan mangrove. 6. Pembentukan kelompok / klaster masyarakat pesisir sebagai pelestari lingkungan. 7. Menggugah keterlibatan Pihak ketiga / Investor melalui CSR /CD dalam pelestarian pesisir.

ISU LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA DI KABUPATEN BANGKALAN



Lingkungan Pemukiman



Pemukiman Sederhana

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

MATRIKS STATE PRESSURE RESPON LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Pressure	State	Respon
<p>1. Di wilayah perkotaan dan di kecamatan lainnya masih banyak rumah tangga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai. Di kota Bangkalan jumlah rumah tangga yang bertempat tinggal di tepi sungai sebanyak 10.405 jiwa terletak di 3 kelurahan.</p> <p>2. Kota Bangkalan seluas 18,08 km² setara dengan 1808 Ha sedangkan hutan kota seluas 7.380 m² setara dengan 0,738 Ha. sehingga perbandingan hutan kota dengan kota Bangkalan adalah 0,02%.</p> <p>3. Masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki sarana sanitasi MCK ± 255.481 kk setara dengan 18,8% dari jumlah total penduduk.</p>	<p>1. Pertambahan jumlah penduduk di kabupaten Bangkalan per tahun mencapai 2,08%.</p> <p>2. Pencemaran air dari sumber domestik.</p> <p>3. Belum optimalnya pemilahan sampah di sumber tingkat RT/RW.</p> <p>4. Keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.</p> <p>5. Kurang memadainya dokumen perencanaan pembangunan lingkungan permukiman yang baik.</p> <p>6. Kurangnya informasi pengelolaan lingkungan di tingkat RT/RW.</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan informasi dan akses terhadap kelengkapan sarana di lingkungan permukiman baik dari segi kualitas dan kuantitas.</p> <p>2. Peningkatan pemberian program bantuan baik teknis maupun finansial kepada pemerintahan desa khususnya ke tingkat RT/RW dalam pengelolaan lingkungan permukiman.</p> <p>3. Perambahan luasan RTH.</p> <p>4. Perambahan pembangunan sarana sanitasi air limbah secara komunal skala perkotaan.</p> <p>5. Tersedianya sarana kebersihan tingkat RT/RW dalam pengelolaan sampah dengan mekanisme 3R sebagai upaya mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA).</p> <p>6. Perambahan frekuensi studi/survey di lingkungan permukiman.</p> <p>7. Upaya pengelolaan limbah B3 : melakukan inventarisasi kegiatan/industri penghasil limbah B3, melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3, menyipkan perjanjian dengan dokumen lingkungan, UKL/UKL, AMDAL.</p> <p>8. Menambah luasan ruang terbuka hijau.</p> <p>9. Dalam mengkonversi lahan menjadi wilayah permukiman hendaknya memperhatikan fungsi lingkungan.</p>

1.5 KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN

a. Anggaran Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan program yang telah dicanangkan dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia. Program keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan tercermin dalam anggaran pendapatan belanja, sehingga anggaran sektor lingkungan merupakan bagian dari program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Keberhasilan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk proyek kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan perlu dianggarkan minimal 3%-4% dari total anggaran belanja dari APBD Kabupaten Bangkalan.

Program pendanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangkalan semakin baik.

b. Kebijakan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pembangunan sebagai suatu proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, memiliki resiko terhadap berkurangnya kemampuan sumber daya alam. Sedangkan pertumbuhan penduduk juga dapat mengakibatkan perilaku kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang ada di masyarakat berubah, serta berdampak pula pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang harus diperhatikan adalah kekumuhan, pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, bahan pangan, air bersih, transportasi, persampahan dan lain sebagainya. Untuk menanggapi hal-hal tersebut di atas diperlukan peran serta dan tanggung jawab oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Oleh sebab itu lingkungan hidup tidak dibatasi oleh suatu lapisan maupun suatu unsur, termasuk unsur sosial, ekonomi maupun budaya. Sebagai langkah pemandu telah disepakati kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- (1). Kebijakan Strategi Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Sektor Pendidikan
 - b. Sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
 - c. Sektor agama
 - d. Sektor IPTEK
 - e. Sektor tenaga kerja
- (2). Kebijakan Strategi Bidang Ekonomi
Kebijakan strategi bidang ekonomi diarahkan pada peningkatan :
 - a. Sektor industri, perdagangan, UKM dan koperasi.
 - b. Sektor pariwisata.
 - c. Sektor keuangan daerah.
 - d. Sektor pembangunan daerah.

1.6.6 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan barometer terhadap keseimbangan ekosistem di sebuah kawasan antara luasan ruang terbuka hijau sebagai habitat kehidupan dengan jumlah fauna yang berdiam di lokasi tersebut. Kecenderungan penurunan jumlah flora dan fauna banyak karena ulah manusia. Berkurangnya luasan ruang terbuka hijau atau flora akan berdampak langsung keanekaragaman hayati. Hal ini perlu diantisipasi melalui langkah-langkah sebagai berikut : menyiapkan program pengendalian lingkungan berbasis masyarakat pada klaster di kawasan hutan, melakukan reboisasi/penghijauan secara terpadu, memberikan sanksi hukum terhadap industri/masyarakat yang melakukan pencemaran/kerusakan lingkungan, pemberian sanksi hukum pada pemburu hewan-hewan/burung yang berlebihan.

1.6.7 Pesisir dan Laut

Kekayaan sumber daya alam ekosistem pesisir dan laut sampai saat ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat karena orientasi pembangunan masih berpusat pada ekosistem darat akan

tetapi dengan menjadikan kabupaten Bangkalan sebagai kawasan industri keberadaan pesisir dan laut yang ada di 10 kecamatan terancam fungsinya karena sudah mulai bermunculan industri seperti halnya industri galangan kapal, pengendalian kerusakan sumber daya alam pesisir dan laut dilakukan dengan meningkatkan program rehabilitasi mangrove, pelatihan masyarakat pesisir untuk pengendalian perusakan ekosistem pesisir, demplot, model percontohan hutan bakau yang ideal, sosialisasi ke masyarakat luas khususnya ke masyarakat nelayan, pentingnya menjaga kelestarian mangrove, pembuatan Perda tentang pengaturan sampah kiriman baik dari kapal-kapal yang berlayar maupun dari kota terdekat, pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran Perda Tata Ruang, memberikan sanksi hukum terhadap penebangan hutan mangrove, pembentukan kelompok/klaster masyarakat pesisir sebagai pelestari lingkungan, inventarisasi pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

1.6.8 Lingkungan Permukiman

Penataan lingkungan permukiman untuk mengantisipasi wilayah kumuh maka memberikan bantuan teknis maupun finansial kepada pemerintahan desa khususnya ke tingkat RT/RW dalam pengelolaan lingkungan permukiman, memfasilitasi ketersediaan informasi dan akses terhadap kelengkapan sarana lingkungan di wilayah permukiman baik dari segi kualitas maupun kuantitas, penambahan luasan RTH, penambahan pembangunan sarana sanitasi air limbah secara komunal skala perkotaan, tersedianya sarana kebersihan tingkat RT/RW dalam pengelolaan sampah dengan mekanisme 3R sebagai upaya mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA), penambahan frekuensi studi/survey lingkungan permukiman.

1.6.9 kesehatan Masyarakat

Perkembangan kesehatan masyarakat dari semua aspek kehidupan masyarakat dapat dianggap berhasil apabila ada korelasi antara pembangunan dengan pelayanan mutu kesehatan yang dilakukan oleh para medis, baik ketersediaan fasilitas kesehatan upaya pelayanan oleh tim medis maupun dukungan dana yang memadai, disamping tersebut keberadaan rumah sakit, pukesmas, tenaga kesehatan serta ketersediaan obat akan menjadi modal utama dalam pelayanan prima di bidang kesehatan.

Tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan Kabupaten Bangkalan kepada masyarakat bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, sampai dengan tahun 2008 Kabupaten Bangkalan baru terdapat sebuah Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama Rato Ebu Syarifah Ambami, Puskesmas sebanyak 22 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 67 buah, Posyandu 1.010 buah. Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan terdapat 134 Dokter, 326 bidan, 403 Perawat dan 443 Dukun Bayi.

Kondisi kesehatan masyarakat dalam hal ini jumlah penderita penyakit Kabupaten Bangkalan sampai pertengahan tahun 2008 jumlah penderita penyakit kulit sebanyak ± 2.999 penyakit, ± 6.930 adalah penyakit diare dan ± 10.946 penyakit ISPA. Adapun pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Data Pelayanan Kesehatan Masyarakat

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	RSU. Syarifah Ambami Rato Ebu	1	Di perkotaan Bangkalan
2.	Puskesmas	22	Tersebar di 18 Kec.
3.	Puskesmas pembantu	67	
4.	Dokter	46	
5.	Perawat	403	
6.	Dukun bayi	443	

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 2008

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKALAN

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2003-2007, yaitu "Terwujudnya kemandirian rakyat Bangkalan yang aman dan sejahtera menuju masyarakat madani dengan ditopang oleh perekonomian rakyat yang tangguh dan kuat serta pengelolaan pemerintah yang baik".

2.2 MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKALAN

Untuk mewujudkan visi pembangunan maka telah ditetapkan misi sebagai landasan kerja yang telah ditetapkan, diantaranya :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam proses pemerintah dan pembangunan.
- b. Memberdayakan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan guna ekonomi kerakyatan.
- c. Memberdayakan kelembagaan ekonomi rakyat agar dapat berperan secara optimal dalam membangun ekonomi.
- d. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berpolitik masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum dan demokratisasi.
- e. Menciptakan ketentraman, ketertiban dan kerukunan masyarakat bagi kelangsungan pembangunan.

2.3 KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, GEOLOGI, TATA RUANG, KEPENDUDUKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

a) Geografi

Kabupaten Bangkalan, terbentang pada $112^{\circ} 40' 06''$ – $113^{\circ} 08' 04''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 51' 39''$ – $7^{\circ} 11' 39''$ Lintang Selatan. Dengan lokasi geografis tersebut, Kabupaten Bangkalan mempunyai iklim

tropis dipengaruhi oleh angin muson yang selalu berhembus berganti arah laut dan tenggara dan sebaliknya.

Batas-batas Kabupaten Bangkalan adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Sampang
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Selat Madura / Kota Surabaya

Secara administrasi luas wilayah kabupaten Bangkalan ±1.260,14 Km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 281 wilayah desa/kelurahan, atau lebih spesifik terdiri dari 273 desa dan 8 kelurahan. Dilihat dari komposisi jumlah desa, maka kecamatan Tanah Merah memiliki jumlah desa yang terbanyak yakni 23 desa/kelurahan. Sedangkan paling sedikit Kecamatan Kamal sebanyak 10 desa/kelurahan.

b) Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bangkalan memiliki ketinggian berkisar 2-100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai adalah kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh yang memiliki ketinggian 2-100 meter di atas ketinggian permukaan air laut, sedangkan wilayah yang terletak di bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 meter di atas permukaan air laut, tertinggi adalah Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut.

c) Geologi

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Bangkalan Jenis Batuan Induk di wilayah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Alufium, luasnya ±24.400 Ha atau 19,54%.
- b. Elistosin, Fasies dan Sedimen luasnya ±35.594 Ha atau 28,50%
- c. Fliose dan Fasies Batu Gamping luasnya ±47.294 Ha atau 37,87%
- d. Miosen dan Fasies Sedimen luasnya ±17.600 Ha atau 14,09%

Sedangkan kondisi tanah menurut jenisnya terdiri dari :

- a. Alfial Hidromurf, luasnya ± 9.495 Ha atau 8,27%
- b. Alfial Kelabu Kekuningan luasnya ± 3.250 Ha atau 2,83%
- c. Asosiasi Hodromurf, luasnya ± 9.775 Ha atau 8,51%
- d. Litosal, luasnya ± 2.360 Ha atau 2,05%
- e. Regulat Coklat Kekuningan, luasya ± 2.415 Ha atau 2,10%
- f. Kompleks Graund Gorset Kelabu, luasnya ± 18.203 Ha atau 15,85%
- g. Grumosal Kelabu, luasnya ± 2.360 Ha atau 2,05%
- h. Kpl. Grumosal Kelabu Litosal, luasnya ± 2.584 Ha atau 2,25%
- i. Kpl. Mediteran Coklat dan Litosal, luasnya ± 14.719 Ha atau 12,81%
- j. Kpl. Mediteran Merah dan Litosal, luasnya ± 12.753 Ha atau 11,10%
- k. Kpl. Mediteran dan grumosal, luasnya ± 36.966 Ha atau 32,18%

d) Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan utamanya diperkotaan menyebabkan terjadinya pergeseran pola penggunaan tanah/lahan. Sering dijumpai penggunaan lahan tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang wilayah, seperti pengembangan pemukiman yang tidak diikuti sistem penataan jalan dan drainase yang baik, sehingga timbul berbagai masalah seperti banjir, pencemaran dan hilangnya ruang terbuka hijau.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan pembangunan telah berpedoman pada UU No.26 tahun 2007 yaitu mengenai penataan ruang serta peraturan pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam penataan ruang dan Permendagri No.2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota. Pasca pembangunan jembatan Suramadu perubahan tata ruang dan fungsi lingkungan, tata guna lahan terus akan berkembang sesuai kebutuhan pembangunan seperti perubahan fungsi hutan

dan lahan, seperti pola perubahan pemukiman, perekonomian dan perdagangan, pariwisata dan industri. Sebagaimana diatur melalui perbub no.28 tahun 2009.

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan dilaksanakan agar pemanfaatan ruang wilayah mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kebijaksanaan pembangunan nasional.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu.
3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
4. Terwujudnya tujuan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

e) *Perkembangan Penduduk di Kabupaten Bangkalan*

Perkembangan penduduk Kabupaten Bangkalan dari w aktu ke w aktu mengalami peningkatan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yaitu terjadi penambahan penduduk dari selisih kelahiran dan kematian, juga diakibatkan oleh adanya migrasi netto antara penduduk yang datang dan keluar.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Luas, Tinggi Tempat, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Area (Km ²)	Tinggi dari Permukaan laut	Jumlah	
					Rumah Tangga	Penduduk
1.	Kamal	10	41,40	5	9280	47 687
2.	Labang	13	35,23	45	13920	36 799
3.	Kwanyar	15	47,81	2	8990	46 249
4.	Modung	17	78,79	5	9280	50 001
5.	Blega	19	92,82	5	9280	60 032
6.	Konang	13	81,9	38	9280	44 880
7.	Galis	21	120,56	45	13920	74 068
8.	Tanah Merah	23	68,56	47	13920	60 838
9.	Tragah	18	39,58	19	9280	27 500
10.	Socah	11	53,82	5	12760	57 783
11.	Bangkalan	13	35,02	5	13630	72 309
12.	Burneh	12	66,10	10	13925	59 111
13.	Arosbaya	18	42,46	4	9006	42 802
14.	Geger	13	123,31	100	13965	65 166
15.	Kokop	13	125,75	80	13968	64 823
16.	Tanjung Bumi	14	67,49	2	13677	49 262
17.	Sepulu	15	73,25	2	9312	44 875
18.	Klampis	22	67,10	2	13968	52 812
	Jumlah	281	1 260,14	-	211 361	956 996
	Bangkalan 2007	281	1 260,14	-	214 929	940 331
	2006	281	1 260,14	-	209 299	921 141
	2005	281	1 260,14	-	203 679	902 342
	2004	281	1 260,14	-	199 680	867 546

Sumber Data : BPS Kab. Bangkalan

Hal tersebut mengingat bahwa Kabupaten Bangkalan mengemban peranan penting dalam pembangunan berbagai aspek sosial ekonomi skala regional di wilayah pulau Madura, karena :

1. Sebagai pintu masuk pulau Madura.
2. Pasca dibangunnya Jembatan Suramadu saat ini.
3. Lokasi sangat berdekatan dengan Ibukota Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data Bangkalan dalam angka 2009 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 sebanyak 956 996 jiwa yang terdiri dari laki-laki 456 072 jiwa dan perempuan 500 924 jiwa dengan ratio pertumbuhan penduduk 1,02 % per tahun.

BAB III

KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA

A. LAHAN DAN HUTAN



Pengelolaan lingkungan hidup di dasarkan pada prinsip berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus

dilakukan secara konsekuen melalui pendekatan holistik.

Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses pembangunan wilayah yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari. Melalui penataan ruang pada akhirnya hak seseorang (*property right*) dapat terlindungi tanpa menghambat kualitas dan kreatifitasnya. Oleh sebab itu, penerapan penataan prinsip-prinsip penataan ruang dalam pembangunan perkotaan sangat relevan dan dalam rangka mewujudkan pembungann yang sistematis dan terintegrasi. Pemanfaatan lahan kota terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan yang sering mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam/ruang kota.

Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memacu perkembangan kota yang sangat cepat. Untuk itu perlu adanya upaya pengendalian terpadu agar pengembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan bermanfaat. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan mengacu kepada visi yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemerintahan Kabupaten Bangkalan tahun 2003-2007 yaitu "*terwujudnya kemandirian rakyat Bangkalan yang aman dan sejahtera menuju masyarakat*

madani dengan ditopang oleh perekonomian rakyat yang tangguh dan kuat serta pengelolaan tata pemerintahan yang baik”

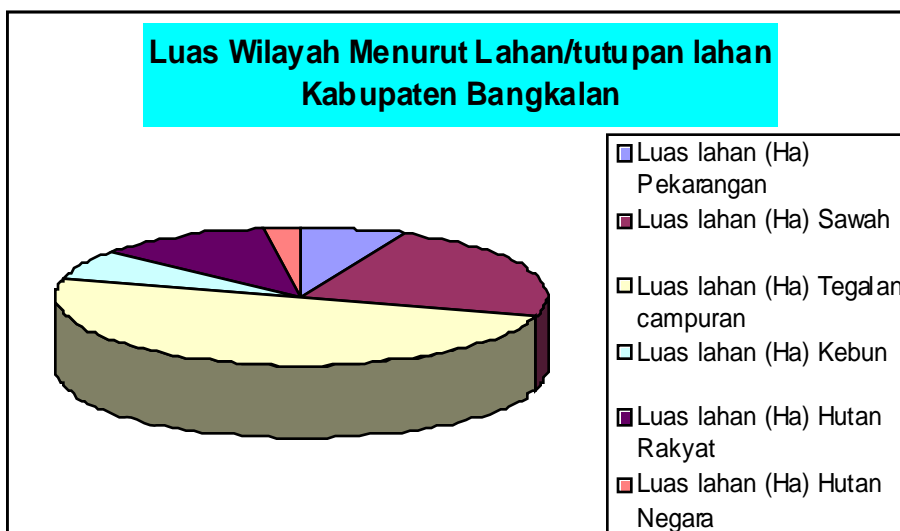
Berdasarkan kajian geologi kabupaten bangkalan yang dilakukan dinas pertambangan bersama DIM (Direktorat Informasi mineral) tahun 2003 menerangkan bahwa pulau madura khususnya kabupaten bangkalan merupakan kawasan khas nomor satu yang merupakan gugusan karbonat yang berpengaruh terhadap penguraian bebatuan dan menyebabkan lahan di kabupaten bangkalan lebih dominan mengandung zat kapur atau Calcium Karbonat (CaCO₃).

Luas kabupaten bangkalan 1260,14 km² , berdasarkan tutupan lahan / penggunaan lahan, lahan di kabupaten bangkalan terbagi menjadi beberapa fungsi antara lain : pekarangan, sawah, tegalan, kebun, hutan (rakyat, negara) dll. Adapun luasan pemanfaatan lahan di kabupaten bangkalan sbb :

Tabel SD-1. Luas Wilayah Menurut Lahan/tutupan lahan Kabupaten Bangkalan Data tahun 2008

No	Kabupaten	Luas lahan (Ha)							Lainnya	Total
		Pekarangan	Sawah	Tegalan campuran	Kebun	Hutan				
						Rakyat	Negara			
1	Bangkalan	9.036	29.462	63.276	8813	14962	3186	-	-	

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, Dishutbun dan bps Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

LUAS KAWASAN LINDUNG

Dari 18 kecamatan lahan yang menjadi kawasan lindung itu hanya 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Geger, kawasan lindung tersebut luasnya ± 25 Ha berbentuk bukit (bukit Geger) yang oleh masyarakat dikeramatkan dan menjadi kawasan wisata alam dan wisata religius.

Lahan Kritis

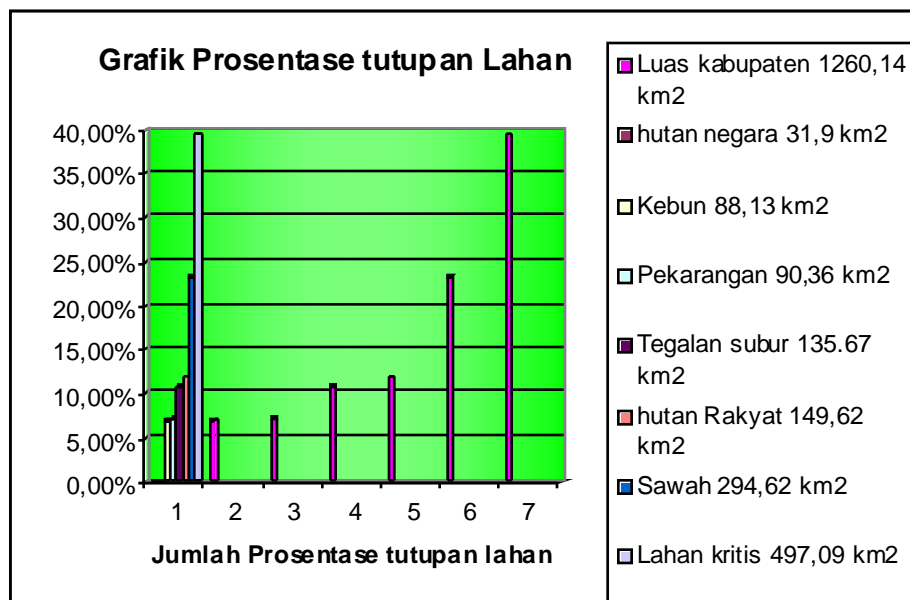
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan luas lahan kritis di Kabupaten Bangkalan seluas 49.708,79 Ha yang tersebar pada 17 Kecamatan dengan luas yang bervariasi sebagaimana tabel SD Perbandingan dengan baku mutu luasan tutupan lahan dengan luas Kabupaten berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 pasal 28-29 tentang kewajiban suatu kawasan 30% tutupan lahan berupa hutan.

Table SD-2 : perbandingan luasan tata guna lahan dengan luas Kab. Dalam km²

No	Luas kabupaten	Prosentase luas tutupan lahan dari luas Kab. Bangkalan						
		Pekarangan	Sawah	Lagalan subur	Kebun	Lahan kritis	hutan	
							Rakyat	negara
1	1260,14 km ²	90,36 km ²	294,62 km ²	135,67 km ²	88,13 km ²	497,09 km ²	149,62 km ²	31,9 km ²
2		7,17 %	23,38%	10,77 %	6,99 %	39,44 %	11,87 %	0,03 %

Sumber data : Dinas pertanian dan Peternakan, Dishutbun, BPS Kab. Bangkalan tahun 2008

Dari uraian table diatas menunjukkan tutupan lahan berupa hutan masih berkisar 8,4% dan kebun rakyat 6,99% hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan masih sangat membutuhkan tambahan untuk luasan runag terbuka hijau berupa sebagaimana tersebut diatas. Untuk memenuhi standart baku mutu sebagaimana UU No. 26 tahun 2007 perihal tata ruang. Adapun estimasi perkembangan sementara apabila di prosentasekan sebgaimana grafik di bawah ini :



Aralisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Uraian grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki lahan kritis yang cukup dominan, sehingga di butuhkan upaya untuk mengembalikan lahan tersebut kepada lingkungan yang berkualitas sebagaimana standart baku mutu.

B. KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati yang tak terhitung jumlahnya / melimpah merupakan keunggulan komparatif bangsa Indonesia dan tak terhitung nilainya serta sebagai modal dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang harus dijaga keberadaannya dan manfaatnya secara berkesinambungan komponen keanekaragaman hayati telah banyak dimanfaatkan untuk berbagi kebutuhan manusia, akan tetapi pemanfaatan yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan populasi hayati. Kehilangan atau punahnya spesies dan degradasi keanekaragaman genetik dapat di akibatkan antara lain aktifitas manusia, konfersi hutan dan lahan serta perubahan iklim dan atmosfer.

Keanikaraman hayati mempunyai peran penting dalam tatanan ekosistem kehidupan dan merupakan unsure hakiki dari planet kita untuk mendukung kehidupan, kesejahteraan manusia serta integritas dengan



alam sumber daya hayati di wilayah Kabupaten Bangkalan. tersebar pada 18 Kecamatan dengan 10 Kecamatan sebagai wilayah yang memiliki pantai.

Jumlah populasi keanekaragaman hayati belum semuanya teridentifikasi baik jenis, guna dan manfaat serta potensi

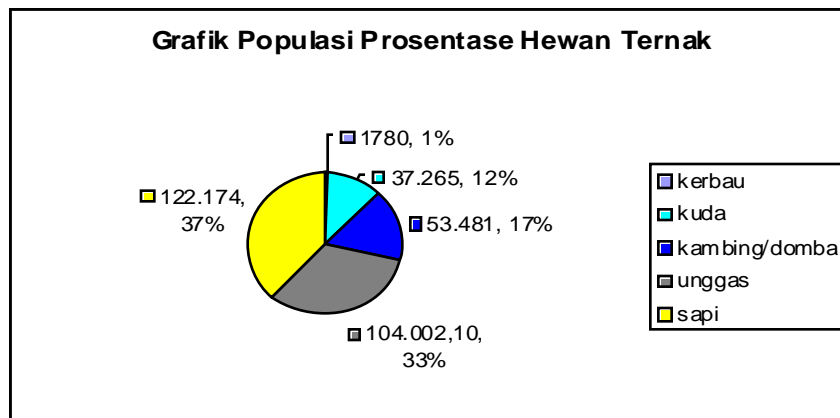
pengembangannya. Keanekaragaman hayati yang telah banyak hidup dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan dengan rincian sbb :

Tabel SD-9 : Jumlah spesies / ternak di Kab. Bangkalan tahun 2008

No	Kabupaten	Jenis Ternak (ekor)					total
		Unggas	Kuda	Sapi	Kerbau	Kambing	
1	Bangkalan	104.002,1	37.265	122.174	1780	53.481	318.702,1
2		32,64 %	11,69 %	38,33 %	0,56 %	16,78 %	

Data : Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2008

Dari daftar table jumlah spesies menunjukkan bahwa kabupaten bangkalan lebih dominan pada peternakan sapi sedangkan spesies pada ketentuan baku mutu belum teridentifikasi secara keseluruhan. Adapun perkembangan potensi peternakan / spesies dapat kami sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini :



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

C. AIR

Proses pembangunan akan berdampak baik secara topografi maupun secara geologi karena pembangunan tersebut banyak tidak mengindahkan kaedah – kaedah pembangunan berkelanjutan satu misal



pembangunan jalan, akses suramadu sisi madura yang terletak di Kecamatan Tragah desa Masaran sangat berdekatan dengan sumber mata air pocong. Sumber tersebut di samping menjadi sumber penghidupan utama untuk minum dan hajat hidup lainnya

banyak mengalir ke sungai – sungai, sawah maupun sungai yang langsung ke laut.

Air merupakan sumber daya penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang harus di jaga dan di lestarikan potensi secara kuantitas maupun kualitas. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan berpengaruh sangat signifikan terhadap kebutuhan air. Dilain pihak ketersediaan air dirasakan semakin terbatas bahkan ada beberapa sumber mata air di Kabupaten bangkalan mengalami penurunan debit air yang sangat drastis bahkan ada beberapa tempat pada saat musim kemarau sudah dapat di katagorikan kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang pada musim kemarau tersebut pemerintah kabupaten bangkalan mensuplai air bersih melalui mobil tangki ke desa – desa yang mengalami kekeringan.

Dari hasil pengamatan penyebab utama terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di sebabkan oleh konfersi hutan dan lahan menjadi : pemukiman, pertanian, pertambangan, pariwisata dan pembangunan lainnya.

Meningkat laju pertumbuhan penduduk terus meningkat dan banyak memilih tempat tinggal yang berdekatan dengan sumber mata air maupun aliran sungai, aktifitas mereka sering mengabaikan kesehatan lingkungan seperti

halnya pembuangan limbah domestik dan limbah lainnya kesungai yang menyebabkan kualitas air sungai tercemari.

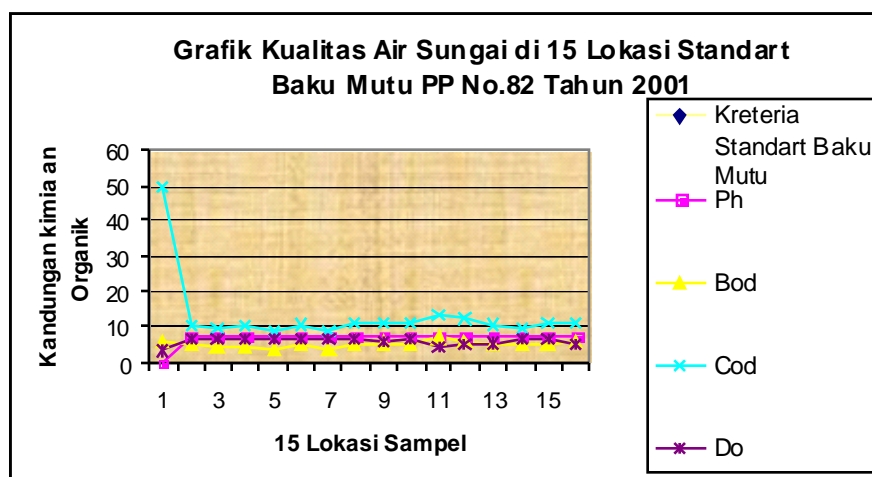
Mengantisipasi penurunan kualitas air di kabupaten bangkalan khususnya wilayah perkotaan telah dilakukan uji laboratorium di beberapa tempat antara lain :

Tabel SD-13:Kualitas Air Sungai dan Sumur Kab. Bangkalan tahun 2008-2009

No	Asal contoh	Ph	Bod	Cod	Do	Resedu terlarut
1	Air badan air sungai lintas Kab. Blega	7,5	4,6	10,34	6,38	381
2	Air badan air Sumber Pocong	7,5	4,4	9,44	6,41	366
3	Air badan air kelubungan 2 tunjung	7,5	4,5	10,02	6,42	350
4	Air badan air sumberbermantan	7,5	4,0	9,03	6,68	1040
5	Air sungai tanjung (pabrik tahu)	7,5	4,8	10,48	6,45	360
6	Air sungai junuk depan masjid junuk	7,5	4,0	9,24	6,53	388
7	Air sungai junuk pertigaan selatan Rumah Sakit	7,4	5,2	11,34	6,31	360
8	Air sungai junuk pertigaan utara Rumah Sakit	7,5	5,4	11,41	6,11	388
9	Airmuara sungai buntaran (samping RPH)	7,4	5,2	11,25	6,39	6850
10	Air sungai gladak pangkoran	7,5	6,8	13,47	4,13	437
11	Air sungai sak sak pertigaan selatan PLN	7,4	5,8	12,09	4,77	410
12	Air muara sungai lebak	7,5	5,0	10,84	5,32	340
13	Air sumberkepang (ring rouad/ STM)	7,5	4,8	9,47	6,37	450
14	Air sumbarpertigaan selatan gria abadi	7,5	5,2	11,24	6,4	414
15	Air muara sungai gladak calteng	7,5	5,8	11,35	4,89	36700
Kreteria Standart Baku Mutu		6-9	6	50	3	1000

Sumber data: BTKL Surabaya

*)PP No.82 Tahun 2001 Kelas III



Analisa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

D. UDARA

Udara merupakan komponen sangat penting baik bagi manusia maupun makhluk lainnya. Tanpa udara kita tidak dapat hidup lama melainkan hidupnya beberapa menit saja sedangkan tanpa makan dan minum kita masih bisa hidup untuk beberapa hari. Kebutuhan akan udara tidak dapat memilih seperti kebutuhan lain karena komposisi udara dan volumenya di alam sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa.

Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara sehingga akibatnya akan mempengaruhi kesehatan manusia yang menghirupnya.



Salah satu faktor penyebab meningkatnya pencemaran udara adalah semakin meningkatnya populasi penduduk di suatu tempat, terutama di pusat kota atau pusat-pusat perekonomian/perdagangan, kegiatan transportasi, industri dan aktivitas penduduk menjadi sumber

pencemaran udara.

Sumber pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak, antara lain industri, pemukiman/rumah tangga dan pembakaran sampah serta tumpukan sampah yang tidak diolah (open dumping). Sedangkan sumber pencemaran udara dari sumber bergerak adalah dari kegiatan transportasi. Di samping itu, kebakaran hutan dan lahan mengganggu kestabilan komposisi gas di atmosfer. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur bahan pencemar yang perlu dipantau yaitu Sulfurdioksida (SO_2), Karbonmonoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO_2), partikulat berukuran kurang dari 10 mikron (PM_{10}) dan timah hitam (Pb).

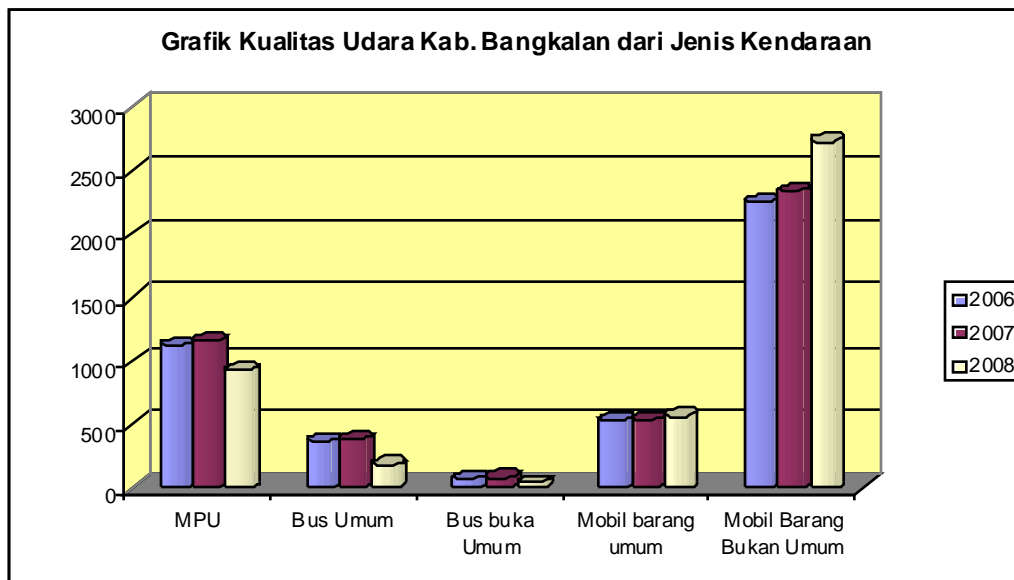
Kualitas udara di Kabupaten Bangkalan masih relatif bersih karena dari data yang ada kualitas hanya di pengaruhi oleh tingkatan polusi dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran kapur dan industri

kecil seperti tahu belum tercemari oleh industri besar adapun jumlah yang mempengaruhi kualitas lingkungan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel SD-2 : Jumlah sarana transportasi di Kab. Bangkalan

No	Jenis kendaraan	tahun			Satuan
		2006	2007	2008	
1	MPU	1125	1158	924	Unit
2	Bus Umum	372	382	182	Unit
3	Bus buka Umum	77	84	42	Unit
4	Mobil barang umum	531	538	571	Unit
5	Mobil Barang Bukan Umum	2252	2338	2731	Unit

Sumber data : BPS tahun 2008



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan kecenderungan perubahan jumlah kendaraan baik yang tinggal maupun yang melintas di Kabupaten Bangkalan sangat fluktuatif. Pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah MPU dan Bus Umum yang melintas di kota Bangkalan disebabkan perubahan, karena perubahan status (banyak mobil pribadi). Sedangkan meningkatnya mobil barang bukan umum disebabkan meningkatnya mobilitas pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Untuk mengetahui dampak emisi yang ditimbulkan oleh masing – masing kendaraan berdasarkan bahan bakar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel SD-16: Emisi CO₂ kendaraan bermotor berdasarkan produk bahan bakar

No	Jenis kendaraan	Sat	Jenis bahan bakar					
			tahun 2007			tahun 2008		
			Bensin	Solar	Emisi Co ₂ (kg/tj)	Bensin	Solar	Emisi Co ₂ (kg/tj)
1	MPU	Bh	728		502.889,31	924		
2	Bus Umum	Bh	-	637	279.297,72		182	
3	Bus buka Umum	Bh	-	953	1.208.997,08		42	
4	Mobil barang umum	Bh	-	849	1.082.278.66		571	
5	Mobil Barang Bukan Umum	Bh	1432	-	9.420.427,17	2374		

Sumber data : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2008

Mencermati data pada tabel diatas bahwa pemakaian bahan bakar minyak sangat dominan yang nantinya akan mengeluarkan emisi gas rumah kaca seperti CO₂, akan tetapi Kabupaten Bangkalan belum mempunyai peralatan berupa AQMS (Air Quality Monitoring System) dan belum melakukan pemantauan secara detail sehingga perubahan meningkat atau tidak pencemaran udara di Kabupaten Bangkalan belum dapat dibuktikan secara ilmiah.

E LAUT, PESISIR DAN PANTAI



Kabupaten Bangkalan memiliki sumber daya alam berupa ekosistem Laut, pesisir dan pantai yang cukup memadai dengan 10 Kecamatan berpantai dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, akan tetapi pemanfaatan potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Bangkalan melainkan orientasi pembangunan masih banyak terpusatkan di daratan sehingga upaya dari pemanfaatan ekosistem laut, pesisir dan pantai masih dibutuhkan pengembangan secara terpadu atau (Integrated Coastal Zone Management-ICZM)

Komponen ekosistem laut, pesisir dan pantai terdiri dari kualitas air laut dengan keanekaragaman biota laut dan pesisir pantai

itu sebagai daerah penyangga memiliki pagar alam berupa hutan pantai yang disebut dengan hutan mangrove, kawasan tersebut berfungsi sebagai filter baik abrasi, intrusi air laut dan juga berfungsi sebagai tempat beranak pinaknya biota laut. Kabupaten Bangkalan dengan 10 Kecamatan yang berpantai merupakan selat yang ramai dalam lalu lintas pelayaran dan ditengarai banyak terjadi pencemaran baik dari sampah sebagai akibat aktifitas masyarakat pesisir dan buangan sampah dari kapal yang melintas di perairan selat Madura.

E. 1 Kualitas air laut

Mengingat padatnya lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan dan dari pengamatan secara kasat mata banyak sampah yang menumpuk di wilayah pesisir dan sering terjadi bau yang sangat tidak sedap dan menimbulkan banyak ikan yang keracunan di kawasan pesisir maka kualitas air di wilayah laut Kabupaten Bangkalan telah terjadi pencemaran, akan tetapi pencemaran tersebut disebabkan oleh unsur logam apa atau penyebab yang lain belum terukur secara ilmiah karena belum dilakukan uji laboratorium.

E. 2 Terumbu karang

Dari 10 Kecamatan wilayah Kabupaten Bangkalan yang memiliki pesisir dan pantai, dengan panjang garis pantai 124,10 Km² potensi terumbu karang di perkirakan terdapat pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Klampis, Sepuluh, Tanjung Bumi, Bangkalan dan Arosbaya karena banyak dijumpai adanya tanah dasar yang keras yang dimungkinkan sebagai tempat pertumbuhan terumbu karang. Ciri-ciri terumbu karang itu ada di suatu kawasan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya ikan hias yang hidup di sekitar areal tersebut. Adapun rincian wilayah yang tutupan terumbu karang berkembang dengan baik sebagaimana tabel dibawah :

Tabel SD-19. Tutupan Terumbu Karang Buatan

No	Lokasi	Luas Tutupan (Ha)	
		Tahun 2006	Tahun 2007
1	Kec. Klampis	5	5
2	Kec. Sepuluh	5	5
3	Kec. Tanjung Bumi	Belum terukur	Belum terukur
4	Kec. Bangkalan	Belum terukur	Belum terukur
5	Kec. Arosbaya	Belum terukur	Belum terukur

Sumber Data : Diras Kelautan dan Perikanan Kab. Bangkalan 2008

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 5 Kecamatan yang berpotensi tumbuhnya terumbu karang hanya Kecamatan Klampis dan Sepuluh yang telah terukur dengan baik sedangkan 3 Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Arosbaya yang berpotensi tumbuhnya terumbu karang belum terukur.

E 3 Padang Lamun

Perairan laut Kabupaten Bangkalan dari 10 Kecamatan yang berpantai tidak diketemukan padang lamun, akan tetapi ada beberapa kecamatan yang membuat padang lamun buatan dalam bentuk rumpun laut yang hingga saat ini belum terukur.

E 4 Mangrove

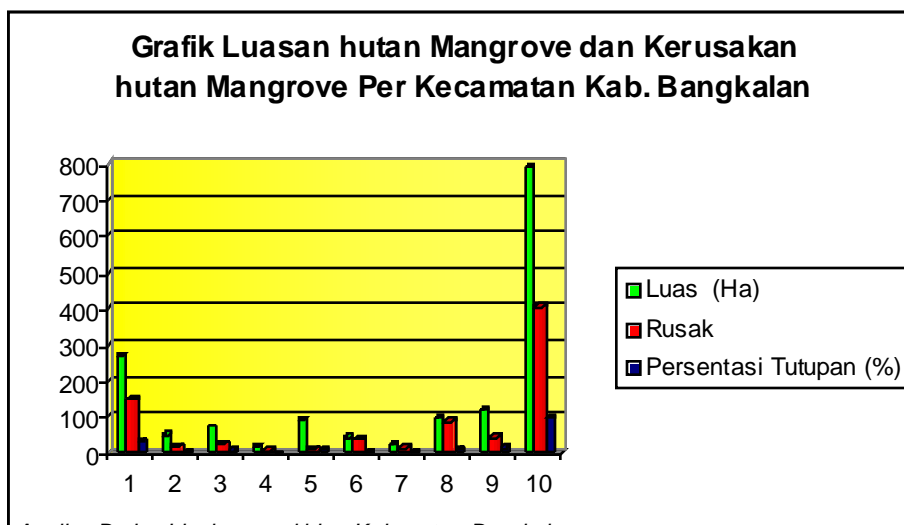
Kawasan peryangga dipesisir yang berfungsi sebagai filter abrasi maupun intrusi air laut pada saat ini berupa hutan mangrove dari 10 Kecamatan yang berpantai hanya 8 Kecamatan yang pantainya ditumbuhi tanaman mangrove karena secara topografi lahan pada kecamatan tersebut berlumpur sedangkan 1 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Bumi kondisi geografisnya lebih banyak berpasir adapun rincian sebaran hutan mangrove di Kecamatan yang berpantai sebagaimana tabel dibawah :

Tabel SD-21. Luas dan Kerapatan Hutan Mangrove Kab. Bangkalan Tahun Data 2008

No	Lokasi	Luas (Ha)	Rusak	Prosentase Tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	Bangkalan	269	150	33,94	5000
2	Arosbaya	50	18	6,31	5000
3	Sepuluh	75	28	9,46	5000
4	Socah	20	9,5	2,52	5000
5	Kamal	90,5	13	11,42	5000
6	Labang	45	40	5,68	5000
7	Kwanyar	25	14,5	3,1	5000
8	Modung	98	86,6	13	5000
9	Klampis	120	45	15,14	5000
	Total	792,5	404,6	100	45.000

Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dishutbun, Kab. Bangkalan tahun 2008

Luasan hutan mangrove pada 9 Kecamatan sampai saat ini memiliki kerapatan tutupan tanaman mangrove 5000 batang per Ha dengan total luas 792,5 Ha setara dengan 7,93 km² perbandingan antara luas wilayah kabupaten dengan luas hutan mangrove yang ada sama dengan 0,6 %, sedangkan kerusakan hutan mangrove yang tersebar di kecamatan tersebut diatas berkisar 51 % dari jumlah luasan yang ada pada saat ini. Idealnya luasan hutan mangrove di Kabupaten Bangkalan dengan panjang pantai 124,10 yaitu 1.241 Ha, maka untuk memenuhi standart baku mutu dibutuhkan penambahan luasan hutan mangrove ± 448,5 Ha.



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

F. IKLIM

Iklim di Kabupaten Bangkalan termasuk iklim tropis sebagaimana iklim yang ada di daerah Indonesia pada umumnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

F. 1 Curah Hujan

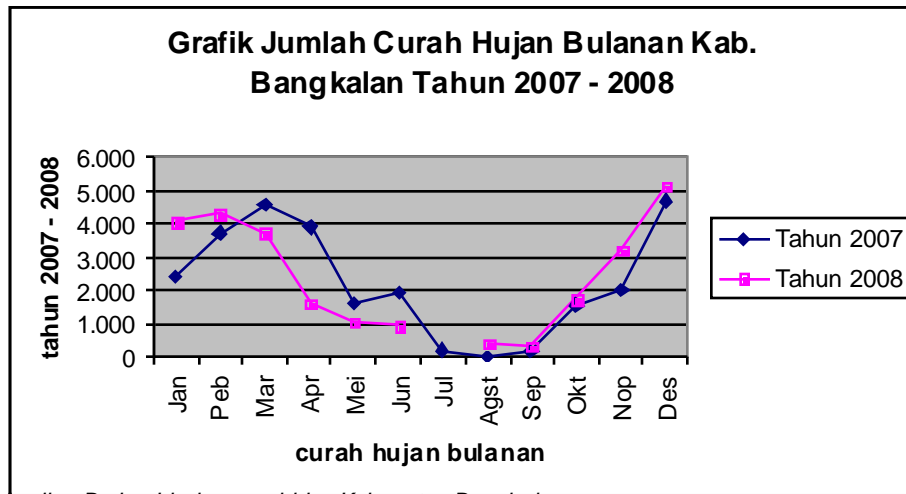
Musim penghujan dimulai bulan Nopember sampai bulan Juni dan puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember, Januari dan Pebruari kemudian berangsur-angsur curah hujan di Kabupaten Bangkalan mulai berkurang dari bulan Mei sampai bulan September dan puncak kemarau dimulai bulan Juli sampai bulan September. Kondisi iklim di Kabupaten Bangkalan 7 bulan merupakan bulan basah dan 5 bulan merupakan bulan kering. Adapun rincian curah hujan bulanan Kabupaten Bangkalan sebagaimana tabel di bawah :

Tabel SD- 22 : Jumlah Curah Hujan Bulanan Kab. Bangkalan Tahun 2007-2008

Curah hujan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
Tahun 2007	2.422	3718	4574	3.858	1.628	1.913	174	11	108	1.523	1.973	4.698
Tahun 2008	4.040	4309	3693	1.584	1.018	914		373	269	1.698	3.189	5.130

Sumber data : BPS Tahun 2007-2008

Dari perbandingan curah hujan pada tabel diatas antara tahun 2007 dengan 2008 bulan ekstrim yang mengalami kemarau pada tahun 2007 bulan Agustus sedangkan pada tahun 2008 itu pada bulan Juli. Untuk bulan basah Kabupaten Bangkalan mengalami curah hujan/bulan basah yang amat tinggi tahun 2007 pada bulan Desember, pada tahun 2008 juga pada bulan Desember. Perbedaan iklim kedua tahun tersebut diatas tidak terlalu signifikan pengaruh pada pola tanam di kabupaten Bangkalan, sehingga pola tanam pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan cenderung dilakukan pada bulan Nopember, Desember, Januari dan Pebruari sampai awal Maret sebagaimana Grafik di bawah.



F. 2 Suhu Udara Rata-Rata

Iklim tropis yang terjadi di Kabupaten Bangkalan juga berpengaruh terhadap fluktuasi meningkat dan menurunnya suhu rata-rata di daerah Kabupaten Bangkalan. Suhu rata-rata di Kabupaten Bangkalan pada saat ini masih dominan dipengaruhi faktor alam sedangkan pengaruh emisi gas rumah kaca belum dapat terukur dengan baik. Adapun suhu rata-rata bulanan di Kabupaten Bangkalan tahun 2008 belum terukur.

G. BENCANA ALAM

Kabupaten bangkalan mempunyai dua iklim yaitu musim kemarau dan penghujan, dampak perubahan musim di Kabupaten Bangkalan pada saat musim kemarau terjadi kekeringan yang menyebabkan banyaknya masyarakat kekurangan air bersih selain dampak tersebut terjadi kekeringan di kawasan hutan yang diawatirkan terjadi kebakaran, apabila tiba musim penghujan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan dua musim tersebut di Kabupaten Bangkalan sering terjadi banjir dan bngsoryang puncaknya terjadi bencana pada bulan Desember, Januari, Pebruari. Kecamatan yang sering di landa banjir adalah Kecamatan Blega dan Arosbaya rutin setiap tahun terjadi banjir sedangkan Kecamatan yang lain hanya apabila turun hujan 1, 2 jam terjadi

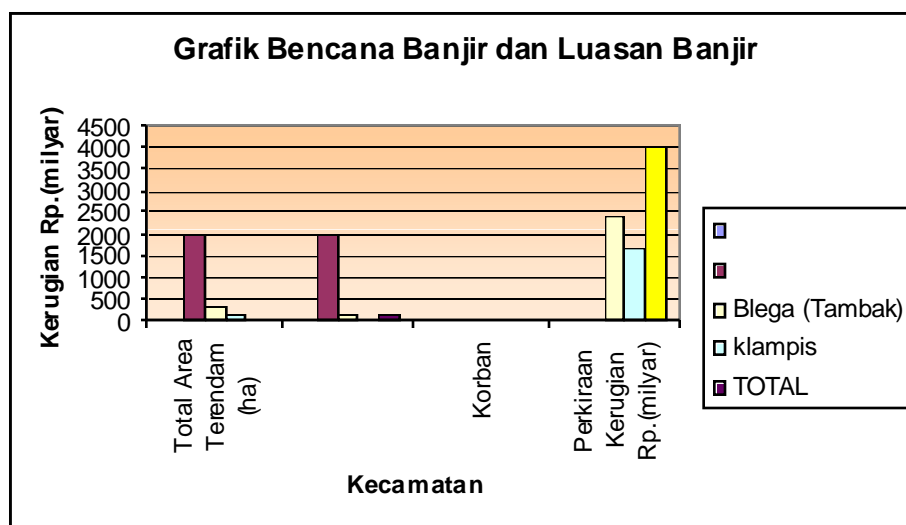
penggenangan dan setelahnya surut, sedang di kedua Kecamatan tersebut Arosbaya dan Blega sering terdaji banjir besar yang disebabkan turunnya hujan bersamaan dengan air laut pasang. Adapun dampak dari bencana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel BA -1. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian Kab. Bangkalan Tahun 2008

No	Kecamatan	Total Area Terendam (ha)		Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
		2006	2007	Mengungsi	Meninggal	
		1	Blega (Tambak)			
2	klampis	122				1.670.000.000,00
	TOTAL		140	11		4.045.200.000,00

Sumber : Badan Kesbang Linmas Kab. Bangkalan

Dari ketentuan table bencana yang terdata hanya pada bencana banjir dan bngsor, luasan bencana banjir dari pada 2 Kecamatan dari 18 Kecamatan pada pada tahun 2006 : berkisar 122 s/d 367,5 sedangkan pada tahun 2007 hanya terjadi banjir di satu Kecamatan dengan luasan 140 sebagian besar berupa tambak. Penyebab utama banjir terjadi pada 2 Kecamatan tersebut karena memiliki sungai yang lebar dan panjang pada saat musim penghujan tiba bersamaan terjadi air laut pasang, kerugian akibat banjir dari 2 Kecamatan tersebut menelan biaya sebesar Rp. 4.045.200.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Adapun flugtuasi dari perubahan bencana banjir pada tahun 2006-2007 pada grafik di bawah ini :



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

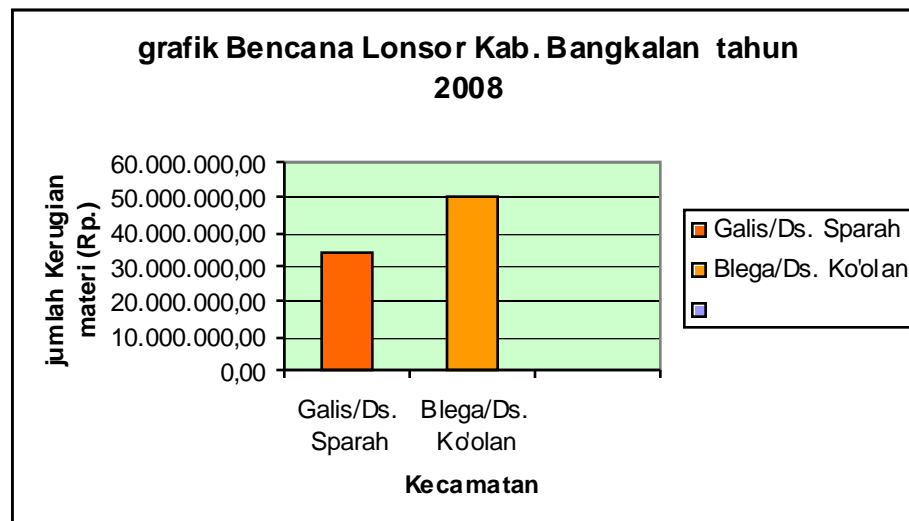
Kegiatan penambangan masyarakat galian golongan C banyak di daerah Kecamatan Galis dan Kecamatan Blega karena topografinya berbukit atau bukit batu sehingga banyak dimanfaatkan bahan material bangunan yang pola penambangannya / galiannya belum sesuai dengan aturan penambangan umum, Bencana longsor pada tahun 2008 terjadi bersamaan atau setelah musim penghujan turun, secara materi kerugian dari bencana tersebut diperkirakan menelan biaya Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah).

Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang sumber penghasilannya dari penambangan batu kapur, perlu di beri bekal tata cara penambangan sebagaimana aturan yang berlaku agar kegiatan tersebut tidak membawa bencana dan memberikan manfaata kepada masyarakat serta terhindar dari kerusakan sumber daya alam lebih luas.

Tabel BA-3. Korban Bencana Tanah longsor dan Kerugian Kab. Bangkalan

No	Kecamatan	jumlah	
		Korban meninggal (jiwa)	Kerugian materi (Rp.)
1	Galis/Ds. Sparah	-	34.000.000,00
2	Blega/Ds. Ko'olan	-	50.000.000,00
Total			84.000.000,00

Sumber data : Badan Kesbang Pol Linmas Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kab. Bangkalan

BAB IV

TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN

Perubahan kondisi lingkungan pada setiap daerah tidak lepas dari pengaruh alam dan perilaku/aktivitas manusia seperti salah satu contoh terjadinya pemanasan global bukan hanya monopoli pengaruh alam sebagai sebab akibat akan tetapi lebih dominan oleh perlakuan manusia yang sangat ekstrim terhadap alam.

Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi alam senantiasa dilakukan melalui kebijakan program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia di antara beberapa tekanan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk serta pola perpindahan penduduk baik yang migrasi maupun yang urbanisasi. Sebab akibat kegiatan masyarakat terjadi kebutuhan terhadap keberlangsungan hidupnya seperti kebutuhan pemukiman baik sederhana maupun sampai yang mewah dari berbagai lokasi, kebutuhan berkembang biak (berumah tangga).

Dalam menjaga stabilitas kelangsungan hidup, masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menjaga kebutuhan keluarga akan sarana dan prasarana kesehatan. Disamping itu masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan makan melalui bercocok tanam dll.

A. Kependudukan

Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan frekuensi pembangunan berdampak pada pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pola perpindahannya sesuai kebutuhan. Adapun untuk mengetahui pertumbuhan dan kepadatan penduduk sebagaimana tabel di bawah :

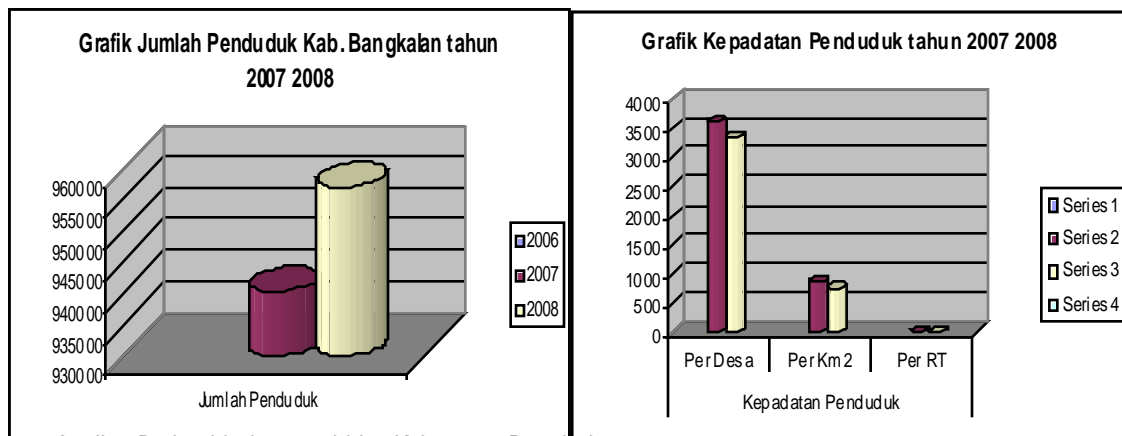
Tabel DE-1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Bangkalan Tahun Data 2007-2008

No.	Kabupaten	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pola migrasi	Kepadatan Penduduk		
					Per Desa	Per Km ²	Per RT
	Bangkalan	1260,14					
1	2008		956.966	-	3598,45	856,8	4,53
2	2007		940.331	22	3346,37	746,21	4,38
3	2006			43			

Sumber Data : BPS hal 57 Kabupaten Bangkalan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun berkecenderungan dari jumlah populasi meningkat demikian pula kepadatan penduduk baik per Desa maupaun per Km² juga meningkat sedangkan kepadatan penduduk per RT perbedaannya tidak terlalu signifikan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2007 ke 2008 sebesar 1,02%. Adapun fluktuasi kenaikan jumlah penduduk dan kerapatan penduduk per Desa, per Km² dan per Rt sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik jumlah penduduk dan kerapatan penduduk



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

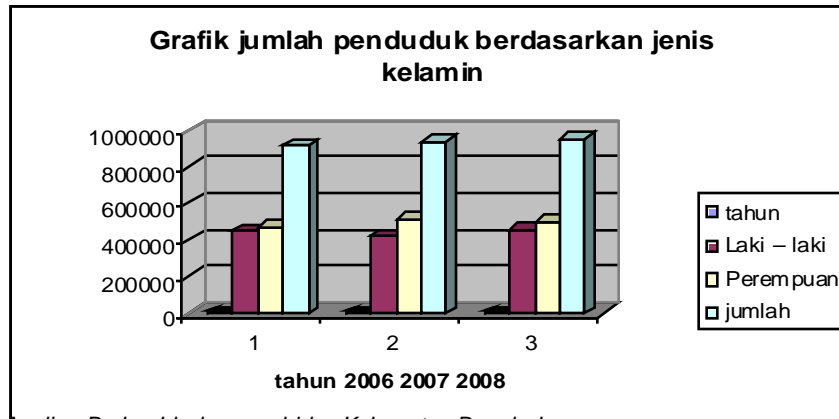
Perkembangan jumlah penduduk bervariasi baik dari tingkatan kelompok umur maupun jenis kelamin, di Kabupaten Bangkalan jumlah perempuan cenderung lebih meningkat di bandingkan jumlah penduduk laki-laki demikian pula berdasarkan tingkatan umur pada tataran umur 10-14 cenderung lebih tinggi dari pada tingkatan umur lainnya yaitu pada umur tersebut jumlah penduduk 120.923. Adapun proyeksi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur sebagai berikut :

Tabel DE-2 : jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Tahun	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	2008	456.072	500.924	956.996
2	2007	425.375	514.956	940.331
3	2006	445.183	475.958	921.141

Sumber data : BPS Kab. Bangkalan tahun 2008

Grafik di bawah ini adalah : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin



B. Perumahan

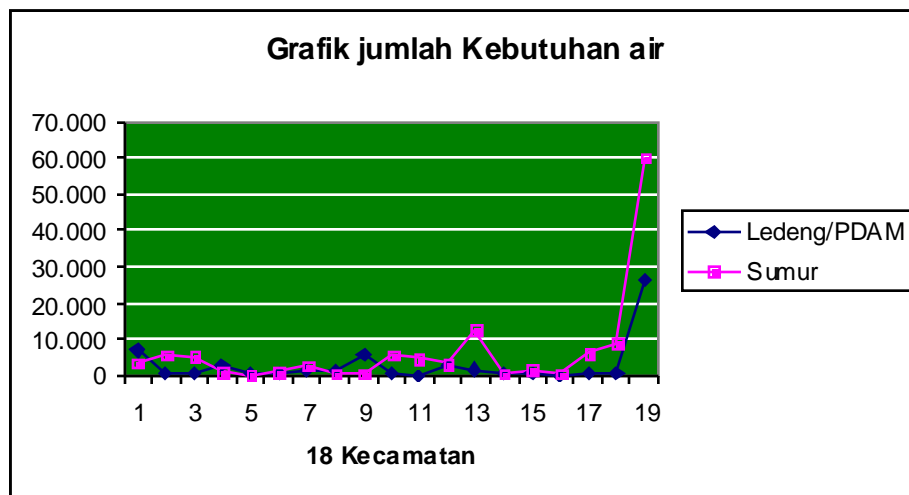
Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bngkaln terbagi berdasarkan tempat tinggal yaitu tempat mewah, mengah, sederhana, kumuh, bantaran sungai dan lokasi pasang surut, di samping bertdasarkan hal tersebut di atas jumlah rumah tangga berdasarkan tempat kebutuhan sumber air untuk minum, tempat pembungan sampah dan tempat pembungan air besar.

Table Se-3: Jumlah sumber air minum yang di butuhkan rumah tangga Kab. Bangkalan tahun 2008

No	Kecamatan/kabupaten/kota	Ledeng/PDAM	Sumur
1	Bangkalan	6.890	3.645
2	Bumeh	345	5.540
3	Socah	420	5.185
4	Kamal	2.540	860
5	Sukolilo	360	145
6	Kwanyar	540	1.075
7	Tragah	895	2.665
8	Tanah merah	1.250	460
9	Blega	5.855	670
10	Gais	370	5.875
11	Konang	165	4.765
12	Modung	2.800	2.940
13	Arosbaya	1.615	12.390
14	Geger	465	390
15	Klampis	385	1.415
16	Sepulu	240	480
17	Kokop	500	6125
18	Tanjung bumi	685	9.095
Total		26.320	60.075

Jumlah rumah tangga yang lebih banyak memakai kebutuhan air dari PDAM atau ledeng terletak di wilayah perkotaan dan 3 Kecamatan di luar kota yaitu Blega, Kokop dan Modung sedangkan masyarakat Kabupaten Bangkalan mempunyai kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan airnya memakai sumur (air tanah permukaan).

Sumber data : BPS tahun 2009



Selain kebutuhan air untuk hajat hidup (minum) masyarakat dalam kesehariaanya membutuhkan tempat bunag air besar (septiteng) dalam

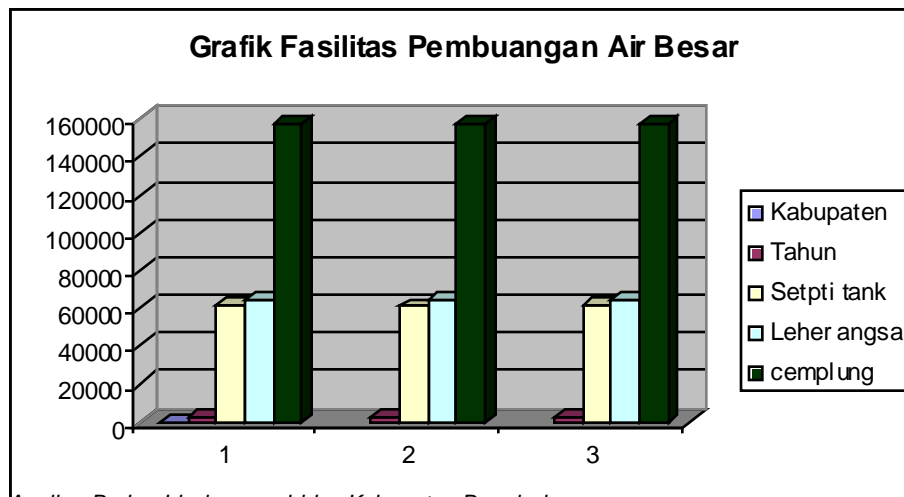
memersihkan diri dan menjaga kesehatannya. Adapun jumlah rumah tangga berdasarkan fasilitas tempat buang air besar sebagaimana table di bawah ini :

Tabel SP-2 : Jenis Sarana Pembuangan Limbah Domestik

No	Kabupaten	Tahun	Setpti tank	Leher angsa	cemplung
1	Bangkalan	2006	60.637	63.862	156.819
2		2007	60.537	63.862	156.819
3		2008	60.966	64.056	157.347

Sumber data : BPS Kab. Bangkalan

Grafik pembuangan air besar yang di gunakan penduduk Kabupaten Bangkalan jumlah rumah tangga dan fasilitas pembuangan air besar :



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

C. Kesehatan

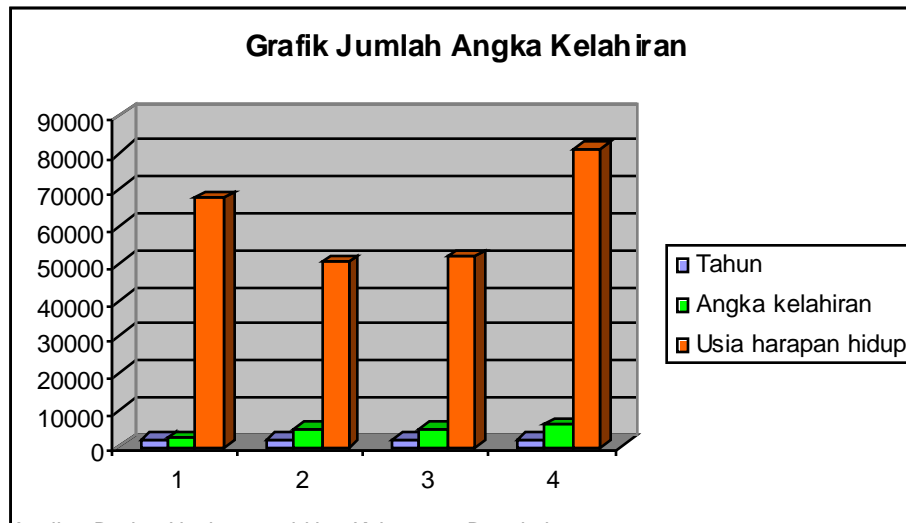
Pertumbuhan penduduk di pengaruhi oleh kesehatan lingkungan maupun dirinya jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan di pengaruhi angka kelahiran dan angka kematian serta angka usia harapan hidup, kondisi tersebut tidak lepas dari upaya – upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan terhadap masyarakat. Perbandingan antara angka kelahiran di Kabupaten Bangkalan dengan angka kematian cenderung lebih tinggi angka kelahiran sedangkan usia harapan hidup sudah menjadi satu

kesatuan dengan angka kelahiran. Adapun perbandingan angka kelahiran tahun 2006, 2007 dan 2008 sebagai berikut :

Tabel DS-6: Angka kelahiran dan usia harapan hidup

No	Tahun	Angka kelahiran	Usia harapan hidup
1	2005	2169	67744
2	2006	4841	50430
3	2007	5068	51479
4	2008	5940	80722

Sumber Data: BPS Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Mencermati grafik tersebut diatas fluktuasi angka kelahiran dari tahun 2005 sampai 2008 sama dengan kecenderungan usia harapan hidup, senantiasa mengalami peningkatan, hal tersebut di pengaruhi oleh kondisi kesehatan masyarakat.

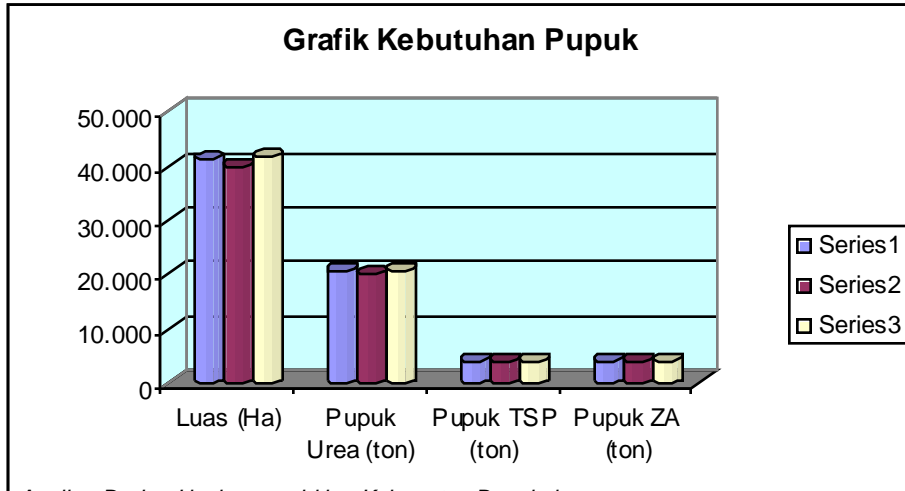
D. Pertanian

Dari luas Kabupaten Bangkalan 1260 km² telah terbagi beberapa tutupan/peruntukan tata guna lahan berupa Pekarangan, Sawah, Tegalan, Kebun, Lahan kritis dan Hutan. Mengingat jumlah sawah relative besar mata pencaharian masyarakat Bangkalan selain perdagangan, peternakan dan nelayan juga bekerja pada sektor Pertanian karena luas sawah di Kabupaten Bangkalan cukup luas. Adapun peningkatan jumlah kebutuhan air sesuai dengan luas sawah yang ada dapat dilihat pada table dibawah :

Tabel SE-4: Luas lahan sektoral dan kebutuhan pupuk

No.	Tahun	Luas (Ha)	Kebutuhan air (m ³)	Kebutuhan Pupuk (kwintal)		
				Pupuk Urea (ton)	Pupuk TSP (ton)	Pupuk ZA (ton)
1.	2006	41.318	2.892.260 ^s	20659	4131,8	4131,8
2.	2007	40.027	2.801.890 ^s	20013,5	4002,7	4002,7
3.	2008	41.622	2.913.540 ^s	20811	4162,2	4162,2

Sumber Data : BPS dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangkalan



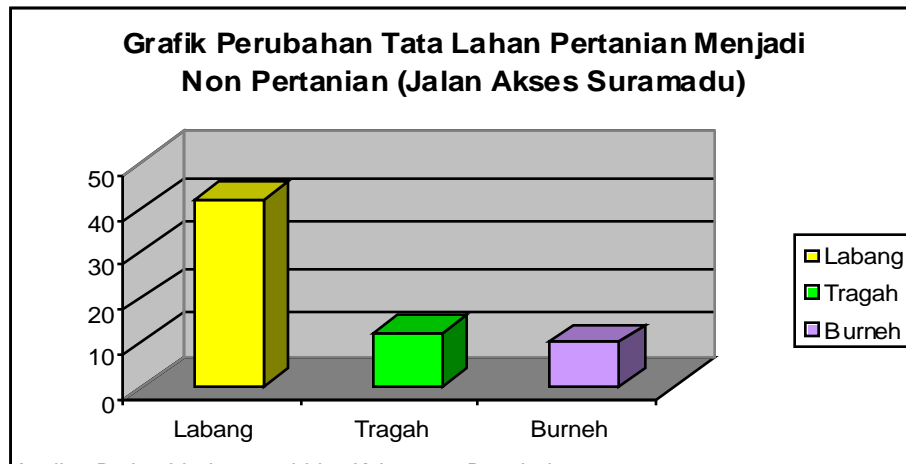
Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (Jalan Akses Suramadu)

Tabel SE-9: Pertumbuhan lahan pertanian ke non pertanian

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Labang	42
2	Tragah	12
3	Burneh	9,9
JUMLAH		63,9

sumber data : Dinas Pertanian Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

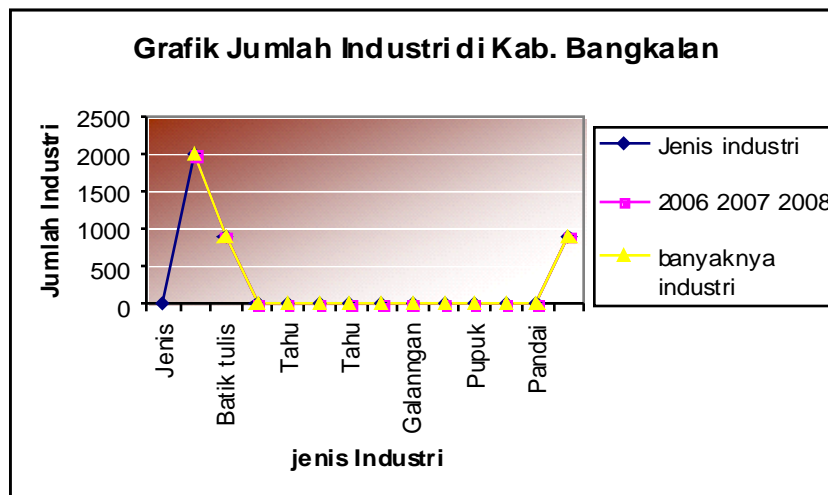
E. Industri

Kabupaten Bangkalan sebagai wilayah yang mempunyai potensi untuk berkembang di bidang industri, ada beberapa industri yang telah tumbuh dan berkembang yang mempunyai potensi limbahnya mencemari sumber air, baik air sungai maupun air laut. Adapun jumlah industri yang berpotensi mencemari sumber air baik sungai, sumber mata air maupun air laut sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel SE-13 : Jumlah Industri dan Jenis Industri tiap Kecamatan Kab. Bangkalan

No	Kecamatan	Jenis industri	jumlah		
			2006	2007	2008
1	Tanjung Bumi	Batik tulis	897	897	897
2	Bangkalan	Tahu	2	2	2
3	burneh	Tahu	1	1	1
4	Kamal	Tahu	1	1	1
5	Geger	Tahu	1	1	1
6	Blega	Tahu	1	1	1
7	Socah	Galanngan kapal adi luhung	1	1	1
8	Sepuluh	Tahu	1	1	1
9	Blega	Pupuk pospat	1	1	1
10	Kamal	Pupuk pospat	1	1	1
11	Arosbaya	Pandai besi	1	1	1
J U M L A H			908	908	908

Sumber Data : BPS Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

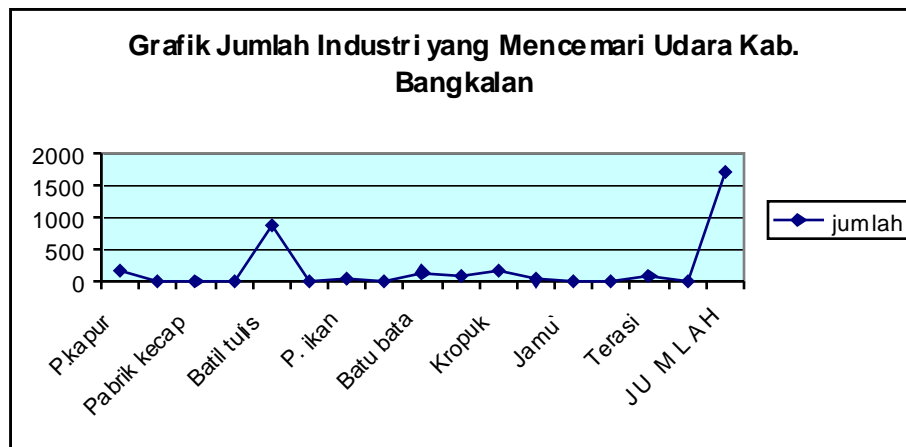
Mencermati tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki industri dengan katagori industri kecil dan sebarannya berada di 11 Kecamatan sedangkan jenis industri yang jumlahnya terbesar adalah batik tulis, sedangkan jenis lainnya adalah pabrik tahu.

Dari beberapa industri yang ada di Kabupaten Bangkalan disamping ada yang mencemari sumber air (mata air, sungai dan laut), ada beberapa industri yang mencemari udara. adapun jenis industri yang mencemari udara seperti tabel di bawah ini:

Tabel SE-14: Jumlah Industri dalam skala kecil

No	Jenis industri	jumlah
1	Pembakaran kapur	176
2	Pabrik tahu	7
3	Pabrik kecap	3
4	Pandai besi	1
5	Industri arang	1
6	Batil tulis	897
7	Pengolahan ikan	51
8	Pupuk pospat	2
9	Batu bata	145
10	Pabrik gerteng	83
11	Makanan	12
12	Pabrik tempe	35
13	Jamu	4
14	Kropuk dan emping melinjo	191
15	Terasi dan petis	87
16	Air minum	6
JUMLAH		1.701

Sumber data : BPS Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Dari grafik dan tabel di atas jumlah industri yang mencemari udara yang paling dominan dari sejumlah industri yang ada di Kabupaten Bangkalan adalah industri batik tulis, pembakaran kapur, pengolahan ikan, pembuatan krupuk dan batu bata.

F. Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Bangkalan terletak di wilayah yaitu daratan maupun di laut, di daratan potensi pertambangan yang paling dominan adalah galian golongan C berupa dolomite, pasir dan batu sedangkan di laut berupa penambangan migas.

Dampak dari kegiatan penambangan galian golongan C menimbulkan kerusakan lahan berupa top soil dan struktur geologi. Hal ini berdampak terhadap menurunnya kualitas fungsi lingkungan di kawasan tersebut, disamping itu lahan bekas galian domestik berupa kubangan yang membahayakan masyarakat di sekitarnya.

Kabupaten Bangkalan merupakan kawasan Kars kelas utama yang terhampar dalam susunan batuan karbonat yang di kenal masyarakat gugusan batu gamping, kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan resapan/penyangga air yang harus di lindungi dan di kembangkan fungsinya..

Memperhatikan susunan geologi di Kabupaten Bangkalan maka perlu dilakukan penyelamatan kawasan Kars jangan sampai melakukan penambangan berdekatan dengan kawasan Kars kelas utama, agar semua potensi sumber daya alam bermanfaat sampai anak cucu kita (pembangunan berkelanjutan).

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Lingkungan Hidup melakukan kerja sama dengan Dinas Pertambangan untuk pemanfaatan bekas lahan tambang menjadi kawasan hijau (reboisasi) dengan tujuan untuk mengembalikan kualitas fungsi lingkungan di kawasan tersebut.. Adapun luas wilayah penambangan di Kabupaten Bangkalan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel SE-14 : luas areal dan produksi menurut jenis bahan tambang

No	Lokasi	Bahan galian	Luas potensi (M ³)	Luas konsesi		
				Nama perusahaan	Bahan galian	Luas (Ha)
1	Geger	Batu gamping	150.965.000			
		Lempung	2.610.000			
		Pasir	300.000			
2	Galis	Batu gamping	52.980.000	Sahrawi	Batu bongkah	0,7
		Lempung	1.000.000			-
		Pasir kwarsa	400.000			-
		Batu pasir	30.000			-
		Pospat	500			-
3	Konang	Batu gamping	194.000			-
		Lempung	2.335.000			-
4	Labang	Batu gamping	220.000			-
		Lempung	845.000			-
		Dolomite	1.450.000			-
		Phospat	300.000			-
5	Modung	Batu gamping	370.000			-
6	kamal	Batu gamping	150.000	Ir. H. yasin M	Pasir urug	1,76
		Dolomite	2.083.000	Achmat	Tanah urug	14,5
7	Tengah	Batu gamping	210.000	H. Majjan	Pospat	2
		Lempung	500.000	Imron	Batu gamping	1
		Dolomite	500.000	H. muhaimin As	Dolomite	0,166
		Phospat	115.000			-
8	Kwanyar	Batu gamping	355.000	Nank suhartatik	Tanah urug	3
		Dolomite	710.000	H. Subbanoro	Tanah urug	1,8
		Lempung	135.000			-
		Phospat	288.000			-
		Kalsit	40.000			-
9	Blega	Batu gamping	550.000	PT. Taga MB	Batu gamping	2
		Lempung	225.000			-
		Phospat	330.000			-
		Kalsit	45.000			-
10	Socah	Batu gamping	234.897.728	Charul Fatah	Tanah urug	5,961
11	Burneh	Batu gamping	683.514.872	Hafluddin	Tanah urug	0,5
		Pasir kwarsa	66.429.963	Masgilan	Pasir urug	1
12	Tanjung bum	Batu gamping	1.720.127.301			-
		Pasir kwarsa	4.015.858			-
		Lempung	39.479			-
13	Sepuluh	Batu gamping	2580.726.127			-
		Pasir kwarsa	12.451			-
		Lempung	83.541			-
14	Klampis	Batu gamping	1.040.309.091	CV. cipta wahana	Tanah urug	50
		Pasir kwarsa	254.741			-
		Lempung	945			-

Sumber data : Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2008

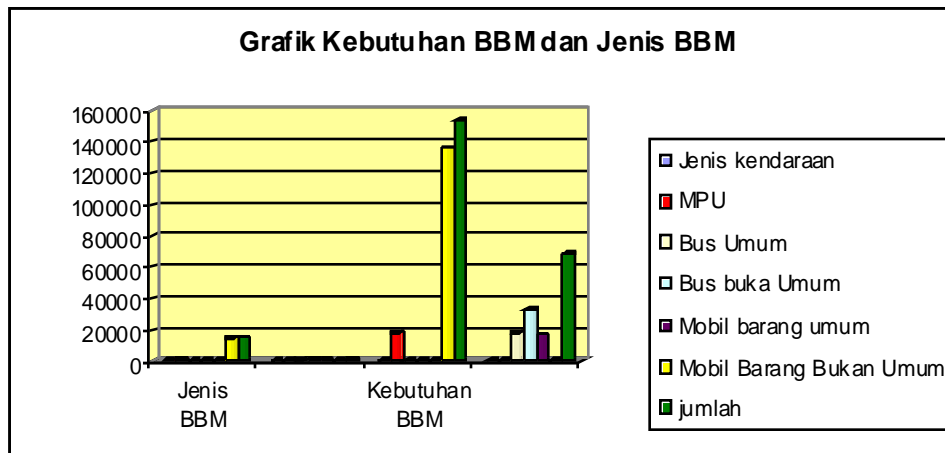
G. Energi

Dinamika pembangunan di Kabupaten Bangkalan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya sarana transportasi. Jenis sarana transportasi yang melintas di Kabupaten Bangkalan terdiri dari MPU, Bus Umum, Bus bukan umum, mobil barang umum, dan mobil barang bukan umum. Dari jenis kendaraan atau angkutan yang banyak di pergunakan masyarakat dari kebutuhan BBM dapat di bagi menjadi 2 (dua) jenis BBM yaitu bensin dan solar. Adapun jumlah dan jenis BBM dari sarana transportasi yang di pergunakan oleh masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel SE-16 : Kebutuhan BBM berdasarkan jenis kendaraan

No	Jenis kendaraan	Jenis BBM		Kebutuhan BBM	
		Bensin	solar	Bensin lt/hr	Solar lt/hr
1	MPU	733	-	18134,42	-
2	Bus Umum	-	216	-	18206,64
3	Bus buka Umum	-	935	-	32425,8
4	Mobil barang umum	-	837	-	17359,38
5	Mobil Barang Bukan Umum	13731	-	135936,9	-

Sumber data : BPS Kab. Bangkalan tahun 2008



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa kendaraan yang menggunakan solar cenderung lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang menggunakan bensin sedangkan dari jenis kendaraan yang lebih tinggi menggunakan solar adalah mobil barang umum.

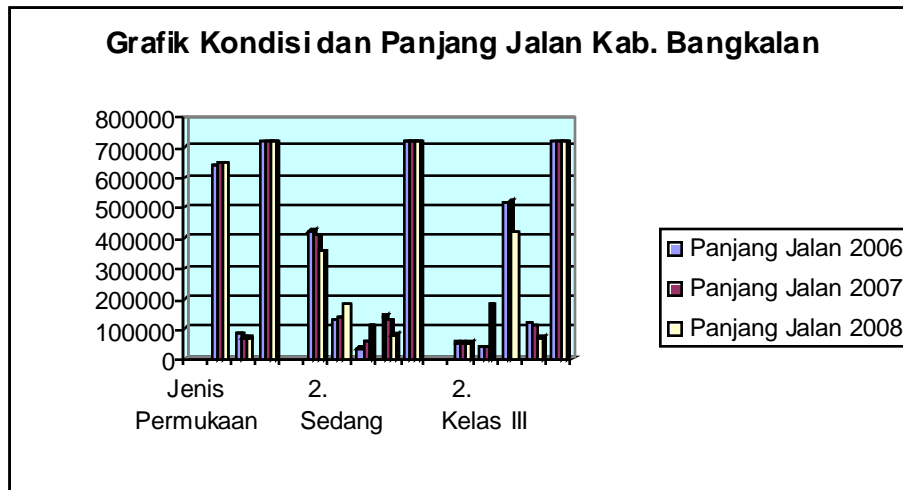
H. Transportasi

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendukung dinamika pembangunan senantiasa ada perimbangan antara jumlah sarana dan prasarana transportasi. Pasca pembangunan Suramadu, frekuensi lalu lintas menuju pulau madura khususnya Kabupaten Bangkalan bertambah dari tahun sebelumnya. Adapun daftar panjang prasarana transportasi berupa jalan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel SE-20 : Panjang Jalan (km²)

No.	Kendaraan	Panjang Jalan (km ²)		
		2006	2007	2008
I.	Jenis Permukaan			
	1. Diaspal	638.715	651.965	651.965
	2. Kerikil	82.650	69.400	69.400
	Jumlah	721.365	721.365	721.365
II.	Kondisi Jalan			
	1. Baik	424.210	405.500	355.300
	2. Sedang	128.070	136.300	180.400
	3. Rusak Ringan	29.795	54.700	107.415
	4. Rusak Berat	139.290	124.865	78.250
	Jumlah	721.365	721.365	721.365
III.	Kelas Jalan			
	1. Kelas II	52.730	52.730	52.730
	2. Kelas III	34.480	34.480	180.235
	3. Kelas III A	516.815	523.815	419.000
	4. Kelas IV	117.340	110.340	69.400
	Jumlah	721.365	721.365	721.365

Sumber data : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Grafik tersebut diatas menunjukkan perbandingan antara kondisi jalan, panjang jalan dan kelas jalan. Dari kondisi yang ada masih terdapat jalan yang rusak berat maupun berkerikil, akan tetapi jumlah jalan yang baik dibanding yang rusak masih lebih banyak yang kondisinya baik.

I. Pariwisata

Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi untuk dikembangkan baik dari segi potensi alam maupun potensi yang lain seperti halnya pariwisata. Potensi pariwisata yang banyak didatangi pengunjung adalah wisata religius, jembatan suramadu, wana wisata, situs-situs dan wisata budaya. Adapun lokasi objek wisata dan jumlah pengunjung sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel SE-24: Lokasi obyek wisata, Jumlah prngunjung dan luas kawasan Kab. Bangkalan tahun 2008

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata *)	Jumlah Pengunjung (orang per tahun)	Luas Kawasan (Ha)
1	Pesarean Syaichona Cholil	Makam	407187	-
2	Psarean Aer Mata Ebhu	Makam	120418	-
3	Kolla Langgudih		4043	-
4	Museum Bangkalan	Museum	3069	-
5	Taman Rekreasi Kota	Kolam Air	30106	-
6	Kawasan Mercusuar	Mercusuar	42235	-
7	Situs Benteng Kolonial	Benteng	1213	-
8	Batik Tulis Tanjung Bumi	Batik	3442	-
9	Wana Wisata Bukit Geger	Pegunungan	15444	-
10	Api Alam Konang	Api Alam	6687	-
11	Pantai Rongkang	Pantai	70514	-
12	Pantai Maneron	Pantai	35100	-
13	Kerapan Sapi	Kerapan Sapi	14160	-
14	Bujuk Sunan Cendana	Makam	1609	-
15	Bujel Tase'	Pantai	465	-
16	Rokat Tase'	Pantai	1904	-
17	Rokat Tase'	Pantai	1890	-
18	Makam Agung	Makam	30730	-

Sumber data: Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangkalan



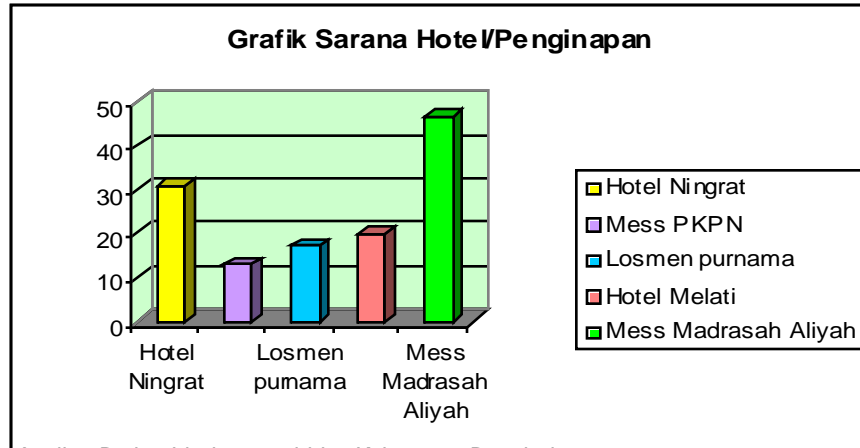
Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Dalam mendukung potensi pariwisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangkalan bagi masyarakat dianggap ada peluang untuk berinvestasi di bidang penginapan, sementara semua penginapan yang ada milik swasta dengan status melati atau bintang satu. Adapun jumlah penginapan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel SE-25: Sarana Hotel/penginapan, Jumlah Kamar dan Tingkat Hunian Kab. Bangkalan tahun 2008

No.	Nama Hotel/Penginapan	Kelas	Jumlah Kamar	Tingkat Hunian (%)
1.	Hotel Ningrat	-	31	-
2.	Mess PKPN	-	13	-
3.	Losmen purnama	-	17	-
4.	Hotel Melati	-	20	-
5.	Mess Madrasah Aliyah	-	47	-

Sumber data: Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangkalan



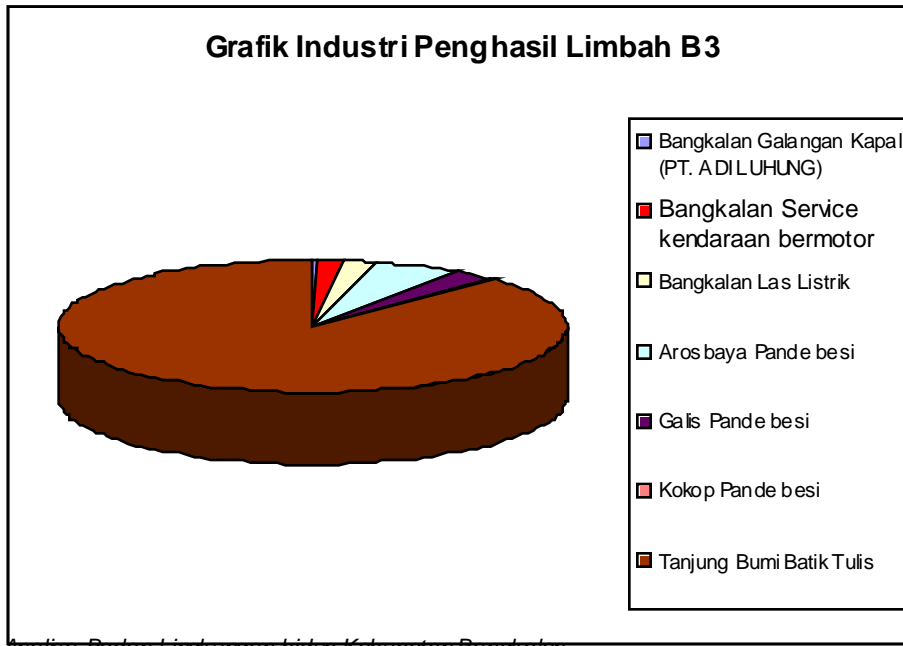
J. Limbah B3

Industri yang tersebar di Kabupaten Bangkalan ada beberapa industri yang menghasilkan Limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi jumlahnya masih relatif kecil. Sedangkan potensi menghasilkan limbah B3 volumenya kecenderungan berkembang mengingat berkembangnya jumlah pelanggan maupun bahan baku dan sarana yang dipakai.

Tabel SD-15 : Industri Penghasil Limbah B3

No.	Kecamatan	Jenis usaha	Jumlah
1.	Bangkalan	Galangan Kapal (PT. ADI LUHUNG) Ujung Piring	1
2.	Bangkalan	Service kendaraan bermotor	6
3.	Bangkalan	Las Listrik	7
4.	Arosbaya	Pande besi	20
5.	Galis	Pande besi	9
6.	Kokop	Pande besi	2
7.	Tanjung Bumi	Batik Tulis	309

Sumber data : BPS tahun 2008



Dari tabel dan grafik industri penghasil limbah ada 5 kecamatan yang jenis usahanya berpotensi menghasilkan limbah B3 dengan volume terbesar pada usaha batik tulis di Kecamatan Tanjung Bumi.

BAB V

RENCANA DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

5.1 AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGKALAN

5.1.1 Penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau

Mengantisipasi perubahan fungsi lingkungan sebagai sebab akibat proses kegiatan pembangunan yang telah banyak pengalihan fungsi lahan dan hutan untuk berbagai kepentingan tersebut maka pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Lingkungan Hidup berupaya mengembalikan tatanan fungsi lingkungan baik secara kualitas maupun kuantitas dengan melakukan penambahan luasan ruang terbuka hijau berupa hutan, taman publik dan pemanfaatan pekarangan untuk di tanami pohon peneduh serta penghijauan pantai melalui swadaya/partisipasi masyarakat, yang pada saat ini luas tutupan hutan di Kabupaten Bangkalan masih 11% dari total luas Kabupaten Bangkalan.

Sejalan dengan kegiatan pembangunan ada kecenderungan penurunan fungsi lingkungan terutama secara geologis dan topografis terjadi pada kualitas dan kuantitas air tanah, karena lokasi pembangunan tersebut sangat berdekatan dengan sumber mata air. Penambahan luasan ruang terbuka hijau mengacu kepada UU tata ruang No. 26 tahun 2007 pasal 28-29 bahwa setiap daerah / kawasan berkewajiban 30% dari luasan kawasan tersebut merupakan ruang terbuka hijau (hutan, taman, pekarangan ekologis).

5.1.2 Pengelolaan Sampah

Mencermati letak Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang pulau Madura pasca Suramadu yang semua orang akan berbondong-bondong untuk bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan dengan segala bentuk usahanya. Hal ini akan berdampak pada perubahan lingkungan seperti halnya persoalan sampah yang pada saat ini sampah di Kabupaten Bangkalan sudah mencapai 518,89 ton/hari atau

setara dengan 1853,17 m³/hari yang kemudian hari akan jauh lebih besar timbulan sampah yang akan terjadi. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Bangkalan melalui Badan Lingkungan Hidup segera mengantisipasi meningkatnya timbulan sampah dengan langkah-langkah sebagai berikut mensosialisasikan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, melakukan pengelolaan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menggugah partisipasi masyarakat dengan pembentukan forum pengelolaan sampah dan mengadakan kerja sama (bina mitra) terhadap kelompok masyarakat tersebut untuk menjadikan sampah sebagai peluang bisnis.

5.1.3 Sumber Mata Air

Kabupaten Bangkalan memiliki 18 Kecamatan yang mana masing-masing kecamatan memiliki sumber mata air secara keseluruhan berjumlah 119 sumber mata air dengan debit yang variatif, hanya satu sumber mata air yang memiliki debit 4250 liter/detik, yaitu sumber mata air Pocong sedang yang lain di bawah 100 liter/detik. Mengacu pada perencanaan kabupaten Bangkalan sebagai kawasan industri dengan zona yang telah ditentukan maka air akan menjadi vital untuk mencukupi kebutuhan industri tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bangkalan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : melestarikan daerah tangkapan air hujan untuk menjaga fungsi daerah resapan air yang dilakukan dengan cara konservasi, antara lain penghijauan, terasering dan pengendalian tata guna lahan di daerah tangkapan air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan potensi sumber daya air, menyediakan sumur resapan mini sebagai penyimpan air di daerah yang kekurangan air.

5.1.4 Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara sehingga berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan memiliki dampak secara ekonomis dengan penurunan kinerja karena gangguan pemapasan. Kegiatan transportasi memberikan kontribusi sekitar 70% terhadap

pencemaran udara baik di pusat kota maupun pusat perekonomian dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan : pemasangan alat pemantau pencemaran udara (ISPU/Indeks Standar Pencemar Udara), merubah perilaku masyarakat dengan program 1 hari tanpa kendaraan bermotor, meningkatkan frekuensi sosialisasi ke masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan udara.

5.1.5 Luasan Lahan dan Hutan

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang akan menyebabkan permasalahan lingkungan seperti sanitasi, kekumuhan, penyediaan air, tersedianya resapan air dan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat mengerikan, seperti banjir dan longsor. Di samping hal tersebut tidak adanya keseimbangan akan kebutuhan lahan terhadap fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan di muka bumi, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : penegakan pelaksanaan rencana tata ruang, penyediaan dana yang memadai dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk memperbaiki lahan baik melalui reboisasi/konservasi maupun dengan sistem tebang tanam, peningkatan luasan hutan di setiap kota kecamatan, penyusunan peta-peta daerah rawan bencana banjir, longsor dan erosi.

A. Rehabilitasi Lingkungan

Keberlanjutan potensi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang merupakan faktor mendasar dalam melestarikan fungsi ekologis sebagai mekanisme pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu karakteristik utama pembangunan berkelanjutan adalah penekanannya pada dimensi antar generasi dalam setiap pemanfaatan sumber daya alam dan tatanan ekosistem. Kegiatan pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan pada sumber daya alam tidak boleh menghilangkan peluang bagi generasi mendatang atas pemanfaatan dari potensi tersebut secara adil dalam menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangkalan senantiasa berpijak kepada perencanaan pembangunan nasional baik kewenangan maupun agenda yang di programkan pemerintah pusat. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah di sesuaikan dengan kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang ada di daerah dan tidak mengesampingkan kepentingan nasional dalam mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan kepada potensi yang ada.

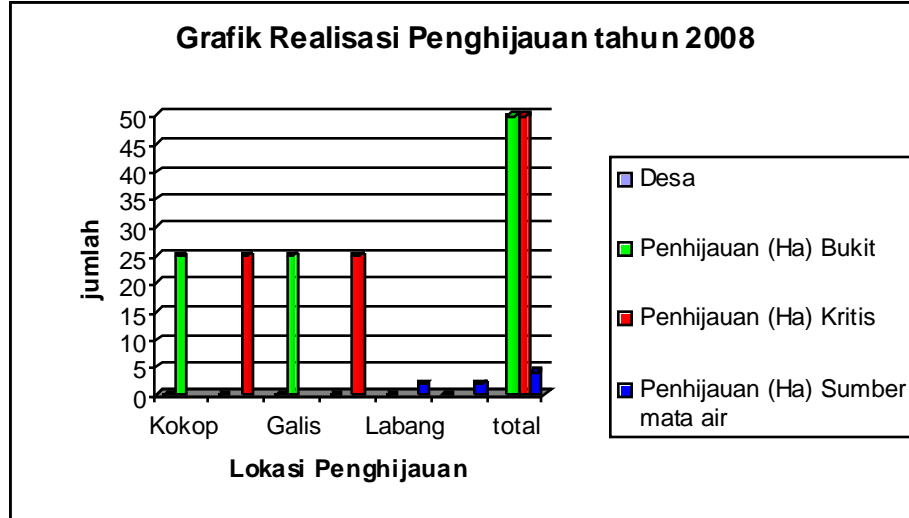
Upaya yang telah di lakukan Kabupaten Bangkalan dalam mengantisipasi perubahan tatanan ekosistem dan mengembalikan fungsi lingkungan sebagai sebab akibat yang di timbulkan dari proses kegiatan pembangunan, telah dilaksanakan penghijauan baik di daerah pesisir maupun di daerah perbukitan secara bertahap.

Adapun rincian penghijauan yang telah dilakukan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel UP-1: Realisasi Penghijauan tahun 2008

No	Kecamatan	Desa	Penhijauan (Ha)		
			Bukit	Kritis	Sumber mata air
1	Kokop	Ds. Kokop	25	-	-
2	Konang	Ds. Durin barat	-	25	-
3	Galis	Ds. Tellok	25	-	-
4	Galis	Ds. Daleman	-	25	-
	Labang	Korot	-	-	2
	Arosbaya	Gege	-	-	2
Total			50	50	4

sumber data : Dinas HutBun Kab. Bangkalan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

Di samping penghijauan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penghijauan lingkungan melalui kelompok tani yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangkalan dengan pemberian bibit langsung kepada kelompok tani dengan jumlah bibit 74.500 batang atau setara 119,2 Ha dengan asumsi jaraktama m 4x4.

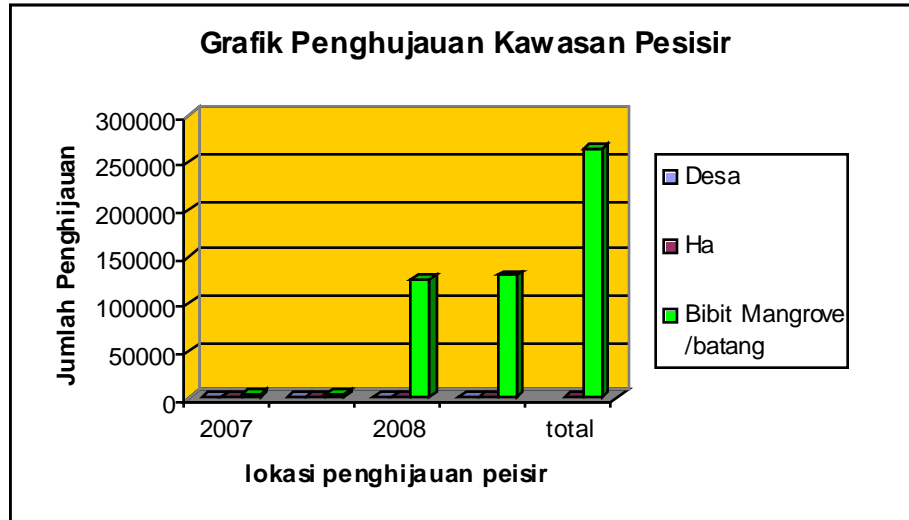
Penghijauan pesisir dilaksanakan di Kecamatan kota baik 2007 maupun 2008 pada dua desa, satu kelurahan, satu desa sedangkan tahun 2007 dilaksanakan di Kematan kota di 2 Kelurahan.

Adapun rincian penghijauan di kawasan pesisir dengan bibit mangrove sbagaimana tabel di bawah ini :

TabelUP-3 : Penanaman hutan mangrove di wilayah kotaBangkalan tahun 2008

No	Tahun	Desa	Ha	Bibit Mangrove /batang
1	2007	Kel.pangeranan	1	5000
2		Kel.Bancaran	1	5000
3	2008	Desasabiyah	25	125.000
4		Kelurahan bancaran	26	130.000
			53	265.000

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan



Analisa Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan

untuk menjaga air permukaan dan kualitas air tanah telah dilakukan injeksi air hujan ke dalam bumi melalui pembuatan sumur resapan pada tahun 2007 telah dilaksanakan pembuatan sumur resapan yang keseluruhannya berlokasi di perkotaan sedangkan tahun 2008 tersebar di beberapa Kecamatan sebanyak 10 sumur resapan.

B. Amdal

Tabel UP-4 : Rekomendasi Amdal/UKL/UPL

No	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan/Pembangunan	pemer karsa
1	2005	UKL - UPL	Pembangunan Pasar Bancaran	PT. Propindo WU
2	2005	UKL - UPL	Pembangunan Pabrik Air Minum Kemasan Tragah	PT. Madura Investama
3	2006	UKL - UPL	Tower (BTS)	PT. Sampoerna Indonesia
4	2006	UKL - UPL	Rumah Sakit Bersalin Bangkalan	RS Aisyiyah
5	2006	Amdal	Pembangunan RSDaerah	BRS Kab. Bangkalan
6	2006	Amdal	Pembangunan Jembatan Suramadu	PU. Bina Marga Jatim
7	2008	UKL - UPL	Pembangunan Galangan Kapal Kec. Socah	PT. Gerbang Samudra Sentosa
8	2008	UKL - UPL	Pendirian base camp Unit Aspal Hotmik Kec. Bumeh	PT. Citra Gading Asri Tama
9	2009	UKL - UPL	SPBU Halim Perdana Kusuma	PT. Kusuma Jaya Utama
10	2009	UKL - UPL	Industri Kecap	UD. Laksana
11	209	UKL - UPL	Pabrik Tahu	Ud Sumber Makmur
12	2009	UKL - UPL	BTS (Tower) 5 titik	PT Indosat
13	2009	UKL - UPL	BTS (Tower) 9 titik	PT Natrindo
14	2009	UKL - UPL	Survei Sismik Arosbaya - Konang	PT SPE Petroleum
15	2009	UKL - UPL	Explorasi Sumur Dolang - Dolang Kec. Konang	PT SPE Petroleum

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan

C. Penegakan Hukum

Fluktuasi proses kegiatan pembangunan bidang lingkungan seperti halnya pemanfaatan sumber daya alam maupun kehidupan sosial masyarakat selalu menimbulkan dampak negatif maupun positif. Dalam mengeleminir dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan program tersebut Badan Lingkungan Hidup menyediakan ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul melalui musyawarah mufakat.

Adapun informasi jumlah dan jenis permasalahan lingkungan yang di adukan masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel UP-6 : Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan Menurut Jenis Masalah

No	Tanggal	Permasalahan	Perusahaan	penyesaian
1	Nopember 2008	Eksplorasi migas meledak	smack	Penghentian kegiatan melalui musyawarah Bupati dengan masyarakat
2	Mei 2007	Penambangan pasir	masyarakat	Pelarangan penambangan pasir melalui surat edaran Dinas Pertambangan.
3	Oktober 2008	Pencemaran air laut bau menyengat Diselat madura Kecamatan Labang	Multi perusahaan	Belum ada penyesaian.
4	Nopember 2009	Eksplorasi migas Ds. Banyuning Kec. Geger masyarakat menolak kawtir terjadi kerusakan lingkungan	SPE petroleum	Belum ada penyesaian, sedang bergolak
5	September 2007	Penambangan sirtu longsor Ds. Trogan Kec. Klampis	masyarakat	Badan LH bersama aparat kepolisian menghentikan sementara.

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan

D. Peran Serta Masyarakat

Dalam melestarikan fungsi lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan mengedepankan partisipasi masyarakat melalui bina mitra maupun kelompok tani mandiri, dari kelompok tani mandiri ada beberapa yang telah mendapatkan penghargaan kalpataru baik tingkat nasional maupun tingkat propinsi. Adapun jumlah kelompok tani dan LSM yang telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan baik di pesisir maupun di daratan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel UP-9 : Peran serta masyarakat / pelestari lingkungan

No	Kecamatan	Nama organisasi	Nama orang	Penghargaan yg diterima
1	Bangkalan	Kelompok tani Gelora mandiri	Bpk. Arifin	Kalpataru jur. 2 tingkat Gubernur Jatim
2	Geger	Kelompok tani gunung merah	H. Ansoori	Kalpataru tingkat Nasional Presiden RI
3	Arosbaya	Kelompok tani Karya Makmur	Suratman	Kalpataru jur.2 Gubernur Prop. Jatim
4	Arosbaya	Kelompok tani Karya Makmur	Mahrin	Kalpataru jur.3 Gubernur Prop. Jatim
5	Blega	Kelompok tani Usaha Tani	H. Amin	Kalpataru jur.2 Gubernur Prop. Jatim
6	Bangkalan	LSM Cakrawala	Bagus	-
7	Bangkalan	Jenur Koning	Hamm	-

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan

E. Kelembagaan

Dalam melaksanakan program kegiatan di bidang lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan berdasarkan kepada UU No. 23 tahun 1997 perihal Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada saat ini telah berubah menjadi UU No. 32 tahun 2009 Perihal perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Disamping pijakan hukum tersebut diatas Badan Lingkungan Hidup untuk menstresing penyelenggaraan program-program di Bidang Lingkungan Hidup telah mengeluarkan produk hukum sebagaimana dibawah ini :

Tabel UP-12 : Produk hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup

No	Jenis produk hukum	Nomor	Tahun	tentang
1	Perda kebersihan	Nomor 5	1989	Penyenggaraan kebersihan Kab. Bangkalan
2	SK Bupati	No.22/JU101/1995	1995	Komisi pengendalian pelestarian lingkungan hidup Kab. Bangkalan
3	Perbubutan kota	Nomor 37	2006	Penetapan lokasi dan luas hutan kota Kab. Bangkalan
4	Keputusan Bupati	No.188.4.652/Kpts/433.013/2008	2008	Komisi Penilaian Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Kab. Bangkalan

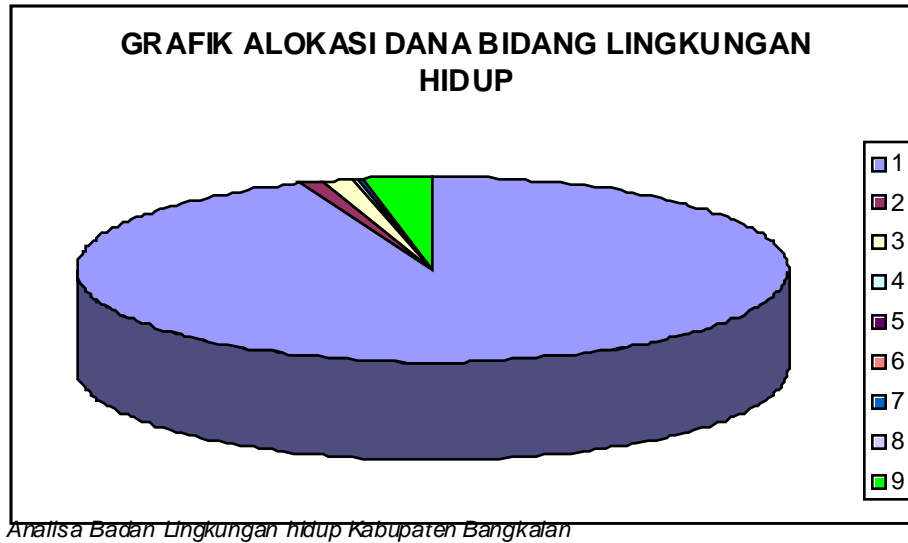
Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia berasal dari DAUM/ APBDII, DAK / APBN, DEKON (Dana Pusat yang Leawat Propinsi). Adapun rincian dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel UP-13 : Anggaran pengelolaan lingkungan

No	Uraian	Jumlah angrgan			Prosen tase
		2007	2008	2009	
1	APBD total Kab. Bangkalan	679.073.783.365,09	734.412.869.148,14	739.279.503.142,66	100%
2	APBD Bidang Lingkungan	-	10.640.676.000	9.656.998.925	1,31 %
3	APBD sector Lingkungan	6.924.975.632	9.996.605.078	11.161.186.066	1,5%
4	Pengelola LH	2.972.445.000	2.564.743.092	1.987.606.380	0,27 %
5	Pengelola Sampah	1.841.400.000	1.386.247.500	727.355.000	0,09 %
6	Lembaga Pengelola RTH	234.500.000	405.000.000	562.855.270	0,07 %
7	PAD	591.086.198	155.365.000	155.365.000	0,02 %
8	DAK	697.000.000	697.000.000	489.000.000	0,07 %

Sumber data : Bagian Keuangan serta Bangkalan dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Bangkalan



Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan yang terhimpun dalam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan mempunyai jumlah personil dengan tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Tabel UP-14 : Jumlah personil menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	SD	168	1
2	SLTP	56	18
3	SLTA	121	2
4	Diploma	1	2
5	Sarjana	11	1
6	Master	5	
7	Doctor	-	-

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup kab. Bangkalan

Dalam menunjang profesionalisme pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup jumlah personil yang telah mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel UP-15 : Jumlah orang yang ikut kursus-kursus

No	Jenis kursus	Jumlah orang	keterangan
1	AMDAL	6	
2	PPLHD	4	
3	PPNS	-	
4	Pengelolaan Tata Ruang perkotaan dan Pengelolaan Persampahan	1	
5	GIS	1	

Sumber data : badan lingkungan hidup Kab. Bangkalan